

Rencana Kerja Tahun 2026



**Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “**Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026**” sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan KUA PPAS Tahun 2026.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2026 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 2025



KEPALA DINAS

DR. M. ILYAS, ST. M.Sc

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman
SK Penetapan	
A. KATA PENGANTAR	
.....	<i>i</i>
B. DAFTAR ISI.....	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	47
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	60
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKP.....	71
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	118
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	121
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	121
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	125
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	130
4.1. Program dan Kegiatan.....	130
BAB V PENUTUP.....	186
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah telah mengalami perubahan cara berpikir dari berorientasi daratan menjadi berorientasi maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan Ekonomi Biru dapat menjadi solusi untuk mengembangkan wilayah yang memiliki potensi laut yang besar di Sulawesi Selatan, namun bukan tanpa tantangan. Untuk memaksimalkan potensi dan mencegah tantangan Ekonomi Biru perlu dilakukan **kerja sama antara semua pihak yang terkait**. Sudah saatnya kita meningkatkan kesadaran kita terhadap potensi laut kita dan berinovasi dalam mengembangkan sektor Ekonomi Biru sehingga tercipta Indonesia yang berkelanjutan. Besarnya potensi sumber daya kelautan pada Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada nelayan, pembudidaya dan unit pengolahan skala menengah dan kecil. Sumberdaya kelautan yang ada belum dapat dimaksimalkan dengan pengolahan perikanan yang baik. Belum adanya keterpaduan pengembangan perikanan karena masing-masing daerah mempunyai program tersendiri sehingga perlu memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan dengan perspektif keruangan. Oleh karena itu pada tahun 2025 tema pembangunan mengarah pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Adanya kebijakan nasional terkait ekonomi biru, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk berperan dalam pembangunan pada tahun 2026. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMN 2025-2029 Provinsi Sulawesi Selatan dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025 - 2029. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026-2027 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027 yaitu “Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA).
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTUKTUR) dengan tematik Investasi.
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI) dengan tematik Ketahanan Pangan, Penanganan Stunting dan Pengendalian Inflasi.

4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI) dengan tematik Penanganan dan Pengurangan Kemiskinan .
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Oleh karena itu pada tahun 2026 perlu menyusun suatu perencanaan yang efektif, efisien, tematik dan inklusif untuk merespon permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan saat ini. Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan ekonomis, efisien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART. Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 disusun secara terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321).
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2026 melalui perencanaan kinerja tahunan,

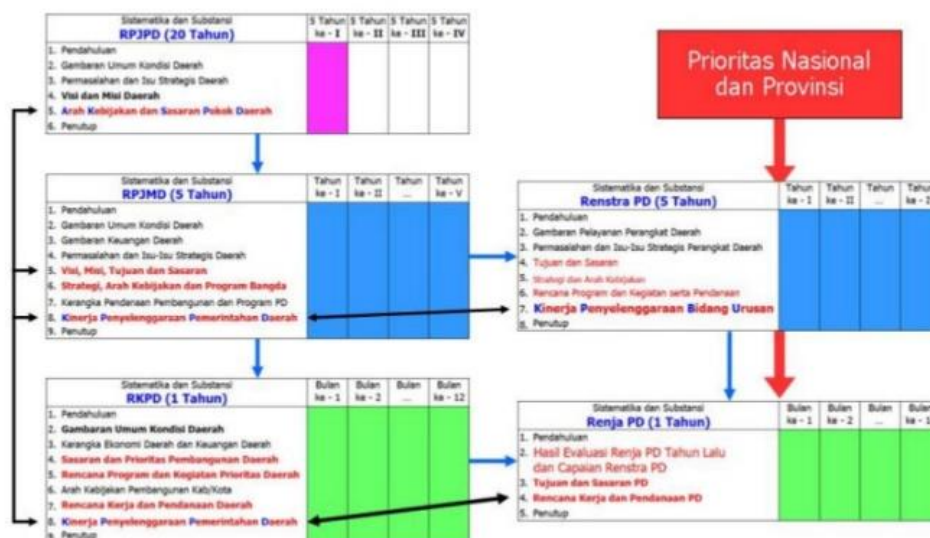
1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

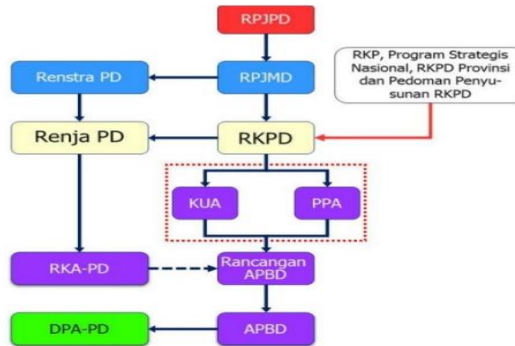
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dengan memperluas cakupan sesuai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2026. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya. (4) sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025 dan tahun berjalan tahun 2026, serta perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026.

Keterkaitan dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah seperti ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Keterkaitan dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah



Gambar 1.2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahu berjalan meliputi :

- 2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 (jika ada). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

- 2.3. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**
Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD;
- 3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Menguraikan tentang Rencana Kerja dengan pendanaan yang sesuai

BAB V PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu disajikan pada tabel 2.1 dalam bentuk format Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)				REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD s/d TAHUN n-1 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			I		II		III		IV		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
3	4	5	6				7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				111. 638.66 8.627,0	86.86 2.140.4 51,99		10.0 14.192. 108,0		5.87 3.480. 568,0		9.26 9.514. 460,0		53.7 99.814. 085,50		78.9 57.001. 221,50		9 0, 90		78.9 57.001. 221,50		2 3,5 1			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				111. 638.66 8.627,0	86.86 2.140.4 51,99		10.0 14.192. 108,0		5.87 3.480. 568,0		9.26 9.514. 460,0		53.7 99.814. 085,50		78.9 57.001. 221,50		9 0, 90		78.9 57.001. 221,50		2 3,5 1			
Dinas Kelautan dan Perikanan				0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0 ,0		548 .299. 500,0		0 ,2 7			
PROGR AM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	%	1 00, 00	35. 989.0 35.75 2,0	36. 061.8 06.95 0,99	2 5,0	10. 014.1 92.10 8,0	2 5,0	5.8 43.93 0.568 ,0	2 5,0	8.4 15.99 6.512 ,0	2 5,0	9.9 93.55 8.687 ,0	1 00, 00	34. 267.6 77.87 5,0	1 00, 00	9 5, 00 2		34. 267.6 77.87 5,0	1 00, 00	1 8, 8 6	Dinas Kelautan dan Perikanan		
1.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan,	%	1 00, 00	402 .113. 800,0	518 .213.8 00,0	3 3,3 0	13. 966.7 29,0	1 3,3 4	0,0	3 3,3 3	10. 098.2 00,0	2 0,0	451 .014. 800,0	9 9,9 7	475 .079. 729,0	9 9, 97	9 1, 6 8		475 .079. 729,0	9 9,9 7	2 8, 2 3			

Perangkat Daerah	penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu																						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,0	25.602.400,0	24.702.400,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2.053.000,0	1,0	19.225.000,0	2,0	21.278.000,0	1,006,14	8,0	2,0	21.278.000,0	1,000	2,009,08		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,0	7.835.600,0	7.835.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	6.512.000,0	1,0	6.512.000,0	1,003,11	8,0	1,0	6.512.000,0	1,000	1,008,34		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,0	3.184.000,0	3.184.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2.972.000,0	1,0	2.972.000,0	1,003,4	9,0	1,0	2.972.000,0	1,000	1,012,33		

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,0	6.067.600,0	6.067.600,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.621.200,0	0,0	405.300,0	1,0	6.026.500,0	1,0	9,32	1,0	6.026.500,0	1,0	2,083		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,0	11.196.600,0	11.196.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8.780.000,0	1,0	8.780.000,0	1,0	7,42	1,0	8.780.000,0	1,0	1,879		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,0	307.080.200,0	424.080.200,0	3,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2.424.000,0	0,0	407.937.500,0	5,0	410.361.500,0	1,0	9,77	5,0	410.361.500,0	1,0	3,824		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	4,0	41.147.400,0	41.147.400,0	1,0	13.966.729,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	5.183.000,0	4,0	19.149.729,0	1,0	4,54	4,0	19.149.729,0	1,0	1,08		

	Daerah																						
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	%	100,0	28.585.852.314,0	30.233.752.419,99	25,53	8.846.733.978,0	25,53	4.942.580.035,0	23,41	7.024.558.232,0	25,53	7.891.454.511,0	100,0	28.705.326.756,0	100,0	94,94	100,0	28.705.326.756,0	100,0	18,53		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	180,0	28.565.706.964,0	30.213.607.069,99	180,0	8.846.733.978,0	0,0	4.942.580.035,0	0,0	7.024.558.232,0	0,0	7.873.993.111,0	180,0	28.687.865.356,0	100,0	94,95	180,0	28.687.865.356,0	56,25	18,54		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,0	762.800,0	762.800,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	469.000,0	12,0	469.000,0	100,0	64,8	12,0	469.000,0	100,0	6,23		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,0	540.900,0	540.900,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	196.000,0	12,0	196.000,0	100,0	32,4	12,0	196.000,0	100,0	4,80		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,0	828.800,0	828.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	300.000,0	1,0	300.000,0	100,0	32,0	1,0	300.000,0	100,0	5,46		

Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,0	676.250,0	676.250,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	1,00,0		2,0	0,0	1,00,0			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,0	17.336.600,0	17.336.600,0	5,0	0,0	5,0	0,0	4,0	0,0	4,0	16.496.400,0	18,0	16.496.400,0	1,00,0	95,15	18,0	16.496.400,0	1,00,0	15,04		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	100,0	93.52.300,0	93.52.300,0	0,0	0,0	5,0	0,0	25,0	0,0	25,0	6.642.500,0	100,0	6.642.500,0	1,00,0	71,3	100,0	6.642.500,0	1,00,0	11,10		

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,0	228.300,0	228.300,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,00,0		1,0	0,0	1,00,0		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,0	6.962.000,0	6.962.000,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.642.500,0	1,0	6.642.500,0	1,005,41	9,0	1,0	6.642.500,0	1,000,0	2,429	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2,0	2.162.000,0	2.162.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,000,0		2,0	0,0	1,000,0		

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian target pendapatan perangkat daerah	%	100,0	8.150.000,0	8.150.000,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	7.828.000,0	100,0	7.828.000,0	100,0	96,5	100,0	7.828.000,0	100,0	14,32		
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1,0	8.150.000,0	8.150.000,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.828.000,0	1,0	7.828.000,0	1,0	96,5	1,0	7.828.000,0	1,0	7,24		
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	%	100,0	26.876.750,0	27.688.750,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	14.262.350,0	100,0	14.262.350,0	100,0	51,1	100,0	14.262.350,0	100,0	5,04		
Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Peningkatan Sarana	Unit	1,0	10.265.000,0	10.265.000,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,00,0		2,0	0,0	2,00,0			

Disiplin Pegawai	dan Prasarana Disiplin Pegawai																					
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 2,0	1.3 72.00 0,0	1.3 72.00 0,0	3 ,0	0,0	3 ,0	0,0	3 ,0	0,0	3 ,0	0,0	1 2,0	0,0	1 00 ,0		1 2,0	0,0	1 00, 0		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1 2,0	1.4 75.35 0,0	1.4 75.35 0,0	3 ,0	0,0	3 ,0	0,0	3 ,0	0,0	3 ,0	1.2 75.35 0,0	1 2,0	1.2 75.35 0,0	1 00 ,0	8 6, 4 4	1 2,0	1.2 75.35 0,0	1 00, 0	3 4, 9 2	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 2,0	13. 764.4 00,0	13. 764.4 00,0	3 ,0	0,0	3 ,0	0,0	3 ,0	0,0	3 ,0	12. 175.0 00,0	1 2,0	12. 175.0 00,0	1 00 ,0	8 8, 4 5	1 2,0	12. 175.0 00,0	1 00, 0	1 1, 5 5	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0 ,0			0 ,0		0 ,0		0 ,0		0 ,0		0 ,0		0 ,0		0 ,0		0 ,0		
Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang	Orang	6 0,0		812 .000,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	812 .000,0	0 ,0	812 .000,0	0 ,0	1 0 0, 0,	0 ,0		0 ,0		

Perundang-undangan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan																0						
1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan umum kantor	%	100,0	287.696.918,0	421.371.518,0	64,29	8.445.328,0	21,43	7.601.707,0	7,14	39.359.980,0	7,14	330.343.219,0	100,0	385.750.234,0	100,0	91,55	100,0	385.750.234,0	100,0	20,20		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,0	6.269.200,0	6.269.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.769.300,0	0,0	5.769.300,0	0,0	92,03	0,0	5.769.300,0	0,0	15,79			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16,0	35.251.718,0	45.576.718,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.853.118,0	4,0	43.853.118,0	25,62	92,22	4,0	43.853.118,0	0,0	9,70			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,0	1.956.800,0	1.956.800,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.908.000,0	1,0	1.908.000,0	100,0	97,51	1,0	1.908.000,0	0,0	17,09			

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	%	100,0	6.598.969.470,0	4.695.757.736,0	25,0	1.145.046.073,0	25,0	893.112.826,0	25,0	1.320.443.422,0	25,0	1.208.694.413,0	100,0	4.567.296.734,0	100,0	97,26	100,0	4.567.296.734,0	100,0	21,88		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12,0	848.196.718,0	882.411.924,0	3,0	198.155.737,0	3,0	186.366.498,0	3,0	192.598.422,0	3,0	256.835.376,0	12,0	833.956.033,0	100,0	94,51	12,0	833.956.033,0	100,0	18,77		

	Daya Air dan Listrik yang Disediakan																						
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	136,0	27.545,000	38.375,000	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.245,000	2,0	36.245,000	1,475	9,445	2,0	36.245,000	1,667	5,734		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	130,0	5.723,220	3.774,970	3,0	946.890,360	3,0	706.746,328,0	3,0	1.127,845,000	3,0	915.614,037,0	1,20	3.697,095,701,0	9,234	9,794	1,20	3.697,095,701,0	2,000	2,58		
1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharaananya BMD	%	100,000	70.024,200,0	147.520,427,0	46,67	0,0	46,67	63.000,0	0,0	21.536,678,0	6,66	83.318,894,0	100,0	105.491.572,0	100,051	7,51	100,000	105.491.572,0	100,000	8,70		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17,0	39.214.400,0	39.214.400,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.531.000,0	0,0	20.270.400,0	2,0	33.801.400,0	116,20	8,0	2,0	33.801.400,0	117,66	17,81		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,0	16.993.800,0	25.107.150,0	5,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6.415.678,0	0,0	11.963.248,0	11,0	18.378.926,0	100,320	71,0	1,0	18.378.926,0	100,00	19,27		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1,0	3.816.000,0	13.957.200,0	0,0	0,0	1,0	63.000,0	0,0	1.590,0	0,0	11.447.688,0	1,0	13.673.688,0	1,0	97,97	1,0	13.673.688,0	1,0	2,0		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1,0	10.000,0	69.241.677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	39.637.558,0	1,0	39.637.558,0	1,0	52,5	1,0	39.637.558,0	1,0	5,63		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,0				100,0			
PREDIKAT KINERJA																SANGAT TINGGI				SANGAT TINGGI			
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Luas Kawasan Pesisir	%	97,60	15.715.900.800,0	15.403.256.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	13.799.122.350,0	68,0	13.799.122.350,0	69,959	86,80	13.799.122.350,0	68,23	61,4	Dinas Kelaut		

KELAUTA N, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	dan Konservas i Yang Dikelola secara berkelanj utan																				an dan Peri kan an		
1.01 Pengelola an Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persent ase kawasan konservas i yang dikelola (luas kawasan yang ditetapka n/total luas kawasan sesuai RTRW)	%	5 9,5 2	15. 467.6 49.90 0,0	15. 154.4 75.90 0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	6 8,0 5	13. 566.8 88.75 0,0	6 8,0 5	13. 566.8 88.75 0,0	1 14 ,3 3	8 9, 5 2	6 8,0 5	13. 566.8 88.75 0,0	0 ,0	6 6, 8 0		
Pengelo laan Kawasan Konservas i di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasark an Penetapa n dari Pemerinta h Pusat	Luasan Kawasan Konservas i di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Terkelola	H a	# ### ### ##	3.4 70.00 0,0	31. 226.0 00,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	# ### ### ##	25. 773.2 10,0	# ### ### ##	25. 773.2 10,0	1 00 ,0	8 2, 5 4	# ### ### ##	25. 773.2 10,0	# ### ### ##	2 ,0 1		

Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	H a	3 6,0	13. 860.9 00.60 0,0	13. 519.9 70.60 0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	1 2,0	0,0	1 9,0	11. 981.4 46.54 0,0	3 1,0	11. 981.4 46.54 0,0	8 7, 21	8 8, 6 2	3 1,0	11. 981.4 46.54 0,0	5 2,0 5	7 2, 3 2		
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	O rang	1 0,0	230 .000,0	230 .000,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	5 0,0	230 .000,0	5 0,0	230 .000,0	5 00, 0	1 0, 0	5 0,0	230 .000,0	3 8,4 6	2 0, 8 8		
Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW	D oku men	1 0	1.6 03.04 9.300, 0	1.6 03.04 9.300, 0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	1 0	1.5 59.43 9.000, 0	1 0	1.5 59.43 9.000, 0	1 00, 0	9 7, 2 8	1 0	1.5 59.43 9.000, 0	0 ,0	8 1, 0 8		

pengelola ekosistem blue carbon	kapasitas ya terkait pengelola an pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	yara kat																			
Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		0,0		
Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	Ton	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		0,0		

PROGR AM PENGELOL AAN PERIKANA N TANGKAP	Produk si Perikanan Tangkap	T on	# ### ### ##	45. 380.2 02.07 5,0	23. 032.7 85.77 5,0	# ### ### ##	0,0	# ### ### ##	0,0	# ### ### ##	20 1.392 .303, 0	# ### ### ##	20. 816.2 34.07 2,0	# ### ### ##	21. 017.6 26.37 5,0	9 7, 19	9 1, 2 5	# ### ### ##	21. 017.6 26.37 5,0	8 8,0 3	2 1, 3 5	D inas Kel aut an dan Peri kan an
1.01 Pengelola an Penangka pan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil	Persent ase peningkat an produksi nelayan perairan laut yang mendapat kan fasilitasi dan pembinaa n	%	1 00, 0	17. 435.9 41.50 0,0	18. 144.5 25.10 0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	2 0,0	16. 998.8 35.01 8,0	2 0,0	16. 998.8 35.01 8,0	2 0, 0	9 3, 6 9	2 0,0	16. 998.8 35.01 8,0	2 0,0	3 5, 6 2	
Penyedi aan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	D oku men	1 ,0	2.1 21.20 0,0	2.1 21.20 0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0 ,0	0,0	0,0	0 ,0		
Penyedi aan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang	U nit	1 23, 0	12. 496.9 57.10 0,0	12. 548.5 08.70 0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	1 23, 0	11. 984.4 20.00 0,0	1 23, 0	11. 984.4 20.00 0,0	1 00 ,0	9 5, 5 0	1 23, 0	11. 984.4 20.00 0,0	8 4,8 3	3 2, 2 3	

	Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																					
Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan	rekomendasi	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Penyediaan Sarana Usaha	Jumlah Sarana Usaha	Unit	131,0	4.936.863.200,	5.593.895.200,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	5.014.415.018,	131,0	5.014.415.018,	100,6	89,31	1,0	5.014.415.018,	43,67	48,2		

	Perairan Darat																					
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	3,0	26.620.000,0	26.620.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	24.987.000,0	3,0	24.987.000,0	193,87	3,0	24.987.000,0	3,61	7,51		
1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT sampai dengan GT	Persentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 yang terbit izin usahanya	%	100,0	105.000,0	105.000,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0			
Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk	Persentase	100,0	105.000,0	105.000,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	14,43			

GT - 30 GT dan beroperasi i sampai dengan 12 mil	kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi i sampai dengan 12 mil																						
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkutan ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi i sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkapan dan pengangkutan ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi i sampai dengan 12 mil yang tersedia	Dokumen	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut Sungai	Persentase Tanda Daftar Kapal perikanan yang terbit berukuran sampai dengan 10 GT di	%	100,0	7.392.400,0	7.392.400,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	1.890.000,0	100,0	1.890.000,0	100,0	25,7	100,0	1.890.000,0	100,0	10,6		

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	2.000,0	11.976.431,400,0	8.515.056.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	2.400,0	900,0	6.763.859,000,0	2.000,0	6.766.259,000,0	1.009,46	7.200,0	2.662,590,000,0	88,69	46,42		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	2,0	288.406.200,0	288.406.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	250.865.347,0	1,0	250.865.347,0	50,698	8,0	1.250.865.347,0	20,0	42,22		
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	40,0	2.280,000,0	2.280,000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.720,000,0	40,0	1.720,000,0	100,544	7,0	4.200,000,0	1,71	5,83		
Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			

Darat	di perairan darat																					
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3,0	735.715.400,0	797.989.400,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	40.3175.845,0	0,0	193.264.000,0	1,0	596.439.845,0	33,7	7,4	1,0	596.439.845,0	1,6	5,8	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1,0	186.650.000,0	205.324.859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	154.036.259,0	1,0	154.036.259,0	1,0	7,2	1,0	154.036.259,0	5,0	9,3	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																91,92				75,44		
PREDIKAT KINERJA																SANGAT BAIK				SANGAT BAIK		

Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	4,0	5.570.000,0	28.496.000,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	4,0	28.256.000,0	6,0	28.256.000,0	150,916	9,0	6,0	28.256.000,0	200,0	12,40		
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAS WAS)	Jumlah POKMAS WAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	31,0	5.790.000,0	18.345.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	31,0	18.195.000,0	37,0	18.195.000,0	119,35	9,18	37,0	18.195.000,0	462,50	18,99		
Koordinasi Penanganan Tindakan Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum	1,0	3.840.000,0	3.840.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3.340.000,0	1,0	3.340.000,0	100,698	8,0	1,0	3.340.000,0	50,0	37,8		
1.02 Pengawasan	Persentase Pengawas	%	100,0	22.588.000,0	47.301.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35.016.600,0	100,0	35.016.600,0	100,400	7,00	100,00	35.016.600,0	100,0	75,3		

Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	an Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																3				0		
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenang	Pelaku Usaha	1 2,0	8.4 90.00 0,0	23. 403.6 00,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	0,0	0 ,0	14. 753.6 00,0	0 ,0	14. 753.6 00,0	0 ,0	6 3, 0 4	0 ,0	14. 753.6 00,0	0 ,0	8 9, 7 1		

	an provinsi																						
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	4,0	6.745.200,0	12.625.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10.933.000,0	2,0	10.933.000,0	50,660	8,60	2,0	10.933.000,0	25,0	74,25		
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	Pelaku Usaha	3,0	7.352.800,0	11.272.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	9.330.000,0	2,0	9.330.000,0	66,67	8,27	2,0	9.330.000,0	3,33	60,85		

HAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan)									0		0		0	2	3		0		1	aturan dan Perikanan
	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan	%	80,0			35,17			31,67			33,08			0,92		9,92			9,92	
	Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	7.311,40			1.465,10			1.797,57			2.043,78			1.559,88		6.866,33			9.353,58	
1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%	100,0	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0	

<p> Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri </p>																							
<p> Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar </p>	<p> Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar </p>	<p> Rekomendasi </p>	<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		<p> 0 0,0 </p>		
<p> 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah </p>	<p> Persentase produksi UPI yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan </p>	<p> % </p>	<p> 100,0 </p>	<p> 403.223.200,0 </p>	<p> 661.710.400,0 </p>	<p> 0,0 </p>	<p> 0,0 </p>	<p> 0,0 </p>	<p> 0,0 </p>	<p> 40,0 </p>	<p> 17.2605.000,0 </p>	<p> 60,0 </p>	<p> 477.854.010,50 </p>	<p> 100,0 </p>	<p> 650.459.010,50 </p>	<p> 100,0 </p>	<p> 98,30 </p>	<p> 100,0 </p>	<p> 650.459.010,50 </p>	<p> 100,0 </p>	<p> 103,284 </p>		

h dan Besar																							
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	3,0	241.846.200,0	475.193.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.2605.000,0	1,0	292.579.010,50	1,0	465.184.010,50	33,0	9,89	1,0	465.184.010,50	1,0	4,29	1,0	6,273
Pelaksanaan Bimbingan dan	Kegiatan yang diberikan kepada	Kegiatan	1,0	161.377.000,0	186.517.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	185.275.000,0	1,0	185.275.000,0	1,0	9,33	1,0	185.275.000,0	3,3	3,3	0,0	9,92	

Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	100,0	99,00	99,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	80,45.28	100,0	80,45.28	100,0	80,05	100,0	80,45.28	100,0	6,23		
Pemantauan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1,0	98,00	98,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	80,45.28	1,0	80,45.28	1,0	80,17	1,0	80,45.28	1,0	16,15		

untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan																							
Fasilitas Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan	unit	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		

4.08 Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Persentase rekomendasi yang terbit (jumlah SKP yang terbit/jumlah rekomendasi SKP yang diusulkan)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan (UPI) skala	rekomendasi	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Pada tabel 2.1 atau tabel TC-29 dilampirkan data capaian tahun 2025 sesuai dengan numenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Permendagri no. 90 Tahun 2019. Berdasarkan alokasi penggunaan anggaran tersebut maka sesuai rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan berjalan maka dapat disampaikan hal penting sebagai berikut :

1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .

Kinerja program /kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai tahun 2025 adalah :

Level Program :

- a. Persentase luas kawasan pesisir dan konservasi yang di kelola secara berkala berkelanjutan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi :

1. Gap antara penetapan dan pengelolaan:

Banyak kawasan konservasi yang mungkin sudah ditetapkan secara administratif atau tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi belum efektif dikelola secara berkelanjutan di lapangan (mis. pencadangan belum operasional, atau belum ada pengawasan intensif).

2. Isu ekologis dan tekanan lingkungan:

Ekosistem pesisir seperti mangrove di Sulawesi Selatan dilaporkan mengalami kerusakan parah, dengan laporan bahwa sekitar 90 % mangrove mengalami kerusakan signifikan, yang mencerminkan tekanan lingkungan yang besar dan tantangan pengelolaan berkelanjutan.

3. Keterbatasan sumber daya dan koordinasi:

Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif membutuhkan sinergi lintas sektor (pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat lokal, lembaga konservasi), serta dukungan fasilitas dan pengawasan yang memadai. Ketidakseimbangan kemampuan teknis, pendanaan, serta dukungan hukum sering menjadi hambatan untuk mencapai pengelolaan secara berkelanjutan.

- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Nilai Produksi Perikanan Tangkap Target sebesar 11.960.23 Milyar, Produksi perikanan tangkap sebesar 451.818.70, Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana

yang sesuai standar operasional mencapai 89.47 %.

Hambatan dan Kendala yang menghambat tercapainya target produksi pengelolaan perikanan tangkap diantaranya :

1. Faktor cuaca dan iklim :

Kondisi **cuaca yang tidak bersahabat**, musim tangkap yang berubah, serta fenomena iklim ekstrem dapat menurunkan waktu melaut dan jumlah hasil tangkapan. Ini terjadi karena nelayan memilih keselamatan dan kondisi perairan yang aman jika cuaca buruk.

2. Penurunan stok ikan dan eksploitasi berlebih

Stok ikan di laut bisa turun akibat **overfishing dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan**, sehingga ikan di banyak perairan tidak sebanyak dulu. Penurunan stok ini berdampak langsung pada volume hasil tangkap yang bisa diperoleh nelayan.

3. Efek perubahan ekosistem laut

Degradasi habitat (misalnya kerusakan terumbu karang) dan perubahan suhu laut memengaruhi produktivitas ikan, terutama jenis-jenis yang sensitif terhadap kondisi lingkungan. Kondisi ini menekan potensi tangkapan di beberapa area.

4. Kapasitas alat tangkap dan SDM nelayan

Struktur armada yang didominasi **kapal kecil, tradisional, atau teknologi tangkap yang kurang optimal** bisa membatasi kemampuan nelayan dalam mencapai target produksi tinggi. Kurangnya investasi dalam peralatan dan teknologi juga memengaruhi produktivitas.

5. Faktor ekonomi dan pasar

Fluktuasi harga ikan, biaya bahan bakar, dan keterbatasan fasilitas (mis. cold storage, akses pemasaran) dapat membuat nelayan kurang termotivasi untuk melaut lebih banyak, sehingga realisasi produksi lebih rendah dari target.

c. Program Budidaya dengan indicator kinerja persentase produksi perikanan budidaya sebesar 96,56 %.

Kendala dan hambatan :

1. **Biaya Pakan yang Tinggi**

Salah satu keluhan terbesar dari pembudidaya adalah **harga pakan ikan yang mahal**. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha budidaya ketika harga pakan naik, margin keuntungan menurun. Pembudidaya bahkan meminta bantuan alat untuk membuat pakan sendiri secara lokal agar lebih murah.

2. **Ketersediaan Bibit Berkualitas**

Masih ada kebutuhan **bibit ikan yang cukup dan berkualitas**. Banyak pembudidaya mengharapkan dukungan dari pemerintah atau lembaga untuk penyediaan bibit unggul sehingga produksi bisa lebih optimal dan seragam.

3. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Untuk komoditas tertentu seperti **udang vanamei**, penguasaan teknis budidaya masih lemah di kalangan pembudidaya. Banyak pembudidaya yang belum memiliki pengetahuan atau pengalaman penuh dalam teknik budidaya yang benar, sehingga hasil produksi kadang tidak maksimal.

4. Kelembagaan Lemah dan Modal Terbatas

Pembinaan kelompok pembudidaya yang **profesional, tangguh, dan berkelanjutan** masih sangat minim. Organisasi kelembagaan yang kuat penting untuk bisa mendapatkan permodalan, akses pasar, serta dukungan teknologi. Minimnya modal juga membatasi pembudidaya untuk memperluas usaha atau meningkatkan teknologi produksi.

5. **Dukungan Infrastruktur**

Beberapa pembudidaya membutuhkan **mesin atau fasilitas**, misalnya mesin pembuat pakan atau fasilitas produksi lainnya yang bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha.

6. **Ancaman Penyakit dan Kesehatan Ikan**

Meskipun spesifik bukan dari Sulawesi Selatan, kasus di daerah lain menunjukkan penyakit ikan tetap menjadi tantangan di budidaya secara umum (kualitas air dan penyakit bisa memicu mortalitas), menunjukkan bahwa aspek kesehatan ikan perlu mendapat perhatian serius dari pembudidaya.

- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil dengan indicator kinerja persentasen produksi pengolahan hasil perikanan mencapai sebesar 93,91 %
 - a. Keterbatasan bahan baku yang tersedia.
 - b. Mahalnya bahan baku dan biaya produksi.
 - c. Permintaan pasar domestic untuk hasil perikanan segar meningkat salah satunya untuk mendukung program makan gratis.

Pada Level Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil capaian jumlah kelompok

pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktif dalam penge;o;aan SD kelautan mencapai 66.67 % atau sebanyak 2 kelompok

- b. Persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan mencapai 20 % dari target yang di rencanakan sebanyak 100 %
- c. Persentase peningkatan produksi nelayan perairan umum daratan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan indicator kinerja cmencapai 10 %
- d. Persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional indicator kinerja cmencapai 89 %
- e. Pengelolaan perikanan budidaya capaian Persentase tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah di Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi capaian indicator kinerja 0 % dikarenakan tidak adanya permohonan tanda daftar dari pembudidaya.
- f. Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan di laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan capaian 29 %
- g. Persentase pemanfaatan sarana pembudidaya ikan di perairan darat capaian sebesar 30 %

Pada Level Sub kegiatan :

- Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi dengan indikator kinerja :
 - a. Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar 31.22 Ha capaian sebesar 87.21 %
- Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan mil
 - a. Jumlah data informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mill tidak terdapat 0 dokumen.
- Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
 - a. Jumlah saarana dan prasaranan pelabuhan yang tersedia sebanyak 18 Unit.
- Penerbitan tanda daftar bagu pembudidaya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daera kab/kota dalam 1 daerah provinsi
 - a. Jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur perizinan berusaha berusaha skala mikro dan kecil bagi pembudidaya ikan kecil di laut dan lintas daerah kab/kota 1 daerah provinsi capaian 0 rekomendasi
- Pengelolaan pembudidaya ikan di laut

- a. Jumlah sarana pembudidaya ikan sebanyak 1 unit capaian indicator kinerja 50 %
- b. Jumlah sarana dan prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia capaian indicator kinerja sebesar 0 %
- Pengelolaan pembudidaya ikan di perairan darat
 - a. Jumlah sarana pembudidaya ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kab/kota capaian indicator kinerja sebesar 33.3 %
- Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi
 - a. Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan usaha pengolahan hasil perikanan yang di periksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi 0 pelaku usaha
 - b. Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi mencapai 2 pelaku usaha capaian sebesar 50 %.
 - c. Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan di wilayah sungai, wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi mencapai 2 pelaku usaha capaian 66,67 %
- Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.
 - a. Jumlah pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing mencapai 1 kegiatan capaiannya sebesar 33.33 %
- Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi berupa sistem informasi manajemen logistic ikan yang terkoneksi dari hulu ke hilir sebanyak 1 sistem informasi.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilai sama)

Kinerja program /kegiatan yang memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai tahun 2025 (nilai sama) adalah :

Level Program :

- a. Program Penunjang urusan pemerintah nilai capaiannya mencapai 100 %
- b. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator kinerja Nilai Nilai ekonomis hasil perikanan (perikanan tangkap, budidaya, pengolahah) mencapai 136.62 %, persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan mencapai 124 %, Produksi olahan hasil perikanan mencapai 93.91 %
- c. Program Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan dengan indicator program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan capaian 100 %

Level Kegiatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikator kinerja, persentase izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi mencapai 100 % , jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil yang aktif dalam pengelolaan SD sebanyak 2 Kelompok
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapat fasilitas dan pembinaan mencapai 20%, persentase peningkatan produksi nelayan perairan umum darat yang mendapat fasilitas mencapai 10 %, persentase kapal perikanan berukuran diatas 10-30 GT yang di terbitkan mencapai 100%, persebtase tanda daftar kapal perikanan yang terbit berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kab/kota dalam 1 daerah orovinsi sebanyak 100 %, persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional 100%.
- c. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang mendapat fasilitasi dan pembinaaan mencapai 100 % dan persentase ketersediaan bahan baku industry penglolaan ikan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi mencapai 100 %.
- d. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil mencapai 100 %, dan pengawasan sumberdaya perikanan di

waduk sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kab/kota dalam satu provinsi sebesar 100 %.

Level Sub kegiatan :

- Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi dengan indikator kinerja :
 - a. Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar 578.435,53 Ha;
 - b. Luas Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di rehabilitasi sebesar 35.81 Ha;
 - c. Penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil/Dokumen Final RZWP-3K 1 Dokumen.
 - a. Jumlah data base perizinan berusaha yang di catat atau didokumentasikan mencapai 1 dokumen
- Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasnya sebanyak 20 orang
 - b. Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan mil
 - a. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 Mil mencapai 123 unit
 - b. Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 Mil mencapai 131 unit
- Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi
 - a. Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat sebanyak 3 Unit.
- Rekomendasi Penerbitan Izin usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 Gt-30 Gt dan beroperasi sampai dengan 12 mil mencapai 100 %
- Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
 - a. Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan sebanyak 4 pelabuhan.
 - b. Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang tersedia sebanyak 18 Unit.

- c. Fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan yang terlaksanan sebanyak 19 layanan
- Pengelolaan pembudidaya ikan di laut
 - a. Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan di laut dan lintas daerah kab/kota sebanyak 1 dokumen.
 - b. Jumlah prasarana pembudidaya ikan di laut sebanyak 2000 unit.
 - c. Jumlah sarana pembudidaya ikan sebanyak 1 unit
- Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan samapai dengan 12 mil
 - a. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi sebanyak 6 pelaku usaha
 - b. Jumlah pokmaswas yang ditumbuhkan sebanyak 37 kelompok masyarakat pengawas
 - c. Jumlah forum koordinasipenangan TPKP tingkat daerah yang dilaksanakan sebanyak 1 forum
- Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapay diusahakan lintas Kabupaten?kota dalam satu daerah provinsi
 - a. Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi mencapai 2 pelaku usaha.
 - b. Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan di wilayah sungai, wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi mencapai 2 pelaku usaha
- Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.
 - b. Jumlah pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing mencapai 1 kegiatan
 - c. Kegiatan yang memberi kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan

produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan resiko sebanyak 1 kegiatan.

- Penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi berupa sistem informasi manajemen logistic ikan yang terkoneksi dari hulu ke hilir sebanyak 1 sistem informasi.

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .

Kinerja program /kegiatan yang melebihi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra tahun 2025 adalah

Level Program :

- a. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator kinerja Nilai Nilai ekonomis hasil perikanan (perikanan tangkap, budidaya, pengolahan) mencapai 136.62 %, persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan mencapai 124 %, Produksi olahan hasil perikanan mencapai 93.91 %

Level Sub kegiatan :

- Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase kawasan konservasi yang dikelola (luas kawasan yang ditetapkan/total luas kawasan sesuai RTRW) capaian sebesar 114.33 % dari target yang direncanakan
 - b. Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh Informasi terkait mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 50 Orang
- Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi mencapai.
 - a. Jumlah dokumen pertimbangan teknis pengelolaan perizinan mencapai 17 dokumen.
- Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta pendidikan dan pelatihan mencapai 17 Kelompok.

- Penerbitan Bukti pencatata kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 Gt yang terbit sebanyak 838 Dokuemn.
- Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan samapai dengan 12 mil
 - a. Jumlah pokmaswas yang ditumbuhkan sebanyak 37 kelompok massyarakat pengawas

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Faktor – faKtor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

1. Sebagian besar program mendukung untuk peningkatan produksi namun keberhasilan produksi perikanan dipengaruhi oleh faktor alam seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir (garam). Tahun 2025 Sulawesi Selatan mengalami cuaca ekstrim dengan curah hujan yang cukup tinggi dan gelombang pasang;
2. Adanya efisensi anggaran sehingga beberapa penunjang program dan kegiatan di kurangi bahkan di hilangkan.
3. Perencanaan yang tidak sistematik dan kurang konsistensi terhadap dokumen perencanaan.
4. Keterbatasan anggaran , kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya kajian ulang alokasi anggaran terhadap pekerjaan kegiatan tertentu.

Faktor – faktor penyebab terpenuhinya melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Adanya sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan program kegiatan didukung dengan dokumen penunjang dan terarah.
3. Konsistensi pada jadwal pelaksanaan dan meminisir terjadinya resiko tidak terpenuhinya target kinerja.

5. Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program dan kegiatan

Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target capaian program dan kegiatan yaitu tidak tercapainya target kinerja pada akhir tahun Renstra jika pelaksanaan kinerja Renja tidak memenuhi target sehingga berdampak pada pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan serta kinerja tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut yaitu :

- a. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.
- b. Perlu kegiatan mengkaji penerapan teknologi tunnel/rumah prisma dengan konstruksi “diperbaharui” sebagai percontohan/kawasan di lokasi penghasil garam. Dengan penerapan teknologi tunnel garam dapat membantu petani untuk tetap berproduksi meski sedang hujan pada Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Perlu kegiatan Koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan penyuluh untuk usulan kelompok nelayan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan
- d. Perlu kegiatan penguatan kelompok dengan penerapan inovasi teknologi penangkapan ikan yang modern dan ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas hasil tangkapan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2. (T-C.30) sebagai berikut:

Tabel 2.2
(Tabel T-C 30, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 202

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang termuat dalam dokumen RPJMD PeProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Sehingga ditetapkan kinerja pelayanan dan penetapan Kinerja dalam suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi garam yaitu melalui pelayanan peningkatan kualitas dan mutu produk garam berupa :
 - a. Memberikan pelayanan keterangan dalam rangka persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut bagi kegiatan /usaha di pesisir dan laut.
- Memberikan pelayanan dalam rangka Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan yaitu pelayanan kebutuhan petambak garam dalam peningkatan produksi dengan mengidentifikasi usulan petambak garam.
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa :
 - a. Memberikan pelayanan Tingkat , NIB dan dokumen kapal
 - b. Memberikan pelayanan Rekomendasi dalam rangka penerbitan izin usaha Perikanan tangkap dengan hasil capaian pelayanan sebanyak unit usaha.
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa :
 - a. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 27 surat rekomendasi
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa
 - a. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor Produk Perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1 unit pengolahan ikan.
 - b. Produksi Benih Ikan Air Tawar pada Instalasi BBI Lajoa Soppeng total produksi benih sebanyak 1.151.500 dengan uraian benih untuk pembinaan/restockin sebanyak 126.400 ekor, benih yang dijual benih sebanyak 925.700 dengan realisasi penjualan yang di peruntukkan untuk PAD sebesar Rp. 151.050.000,-

- c. Produksi Benur Air Payau
Tahun 2025 sebanyak 4.960.000 ekor jenis dengan penjualan sebesar Rp. 125.605.000- dan bantuan ke masyarakat
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan dan peningkatan Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi
 - a. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan dengan hasil sertifikat hasil uji yang di terbitkan sebanyak 1.776 Lembar
 - b. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 mencapai Rp. 1.235.734.000 dari target sebesar Rp. 780.000.000 dengan capaian persentase sebesar 158,43%.
- . Memberikan pelayanan rekomendasi pemanfaatan kawasan konservasi dan perairan dan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan ekosistem laut.

Adanya perubahan kebijakan menyebabkan beberapa program pemerintah mengalami transisi perencanaan sehingga dalam rangka efisiensi anggaran dilakukan refocusing/rasionalisasi belanja pada kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak melaju sesuai dengan agenda karena adanya reformasi pada program pemerintah dimana perangkat daerah harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan perubahan metode penganggaran sehingga turut mempengaruhi pencapaian kinerja program kegiatan yang masih di bawah target.

Selain itu dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang tidak tepat dan belum terukur secara jelas kinerjanya sehingga diperlukan perbaikan/perubahan rencana kerja dan perubahan rencana strategis.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada bagian ini juga disajikan capaian kinerja IKU pada pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 s/d 2029 sebagaimana tabel berikut ini (terlampir). Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dan Implikasi capaian IKU terhadap Renstra 202..... maka Evaluasi Capaian Renstra yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dengan sasaran sebagai berikut :

a. Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran ini terdapat 3 indikator kinerja yaitu persentase nilai Sakip Perangkat Daerah, persentase capaian kinerja program perangkat daerah dan persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti.

Tabel 2.3
Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2024	2025*	2024	2025*	2024	2025*	
1.1	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perangkat daerah	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	86.02	86.21	83,78*	86.21*	97,39	99.75*	Data tahun 2021 dan 2022 adalah data proyeksi
		Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	98	98,5	110.47	111*	112.72	112.79*	
		Persentase Nilai temuan Material LHP yang ditindaklanjuti	82	100	100	100*	100	100*	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran							106,36	106.26	Predikat sangat baik

Untuk mencapai sasaran diatas maka terdapat 2 strategi yaitu 1) penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan 2) ketersediaan dukungan operasional kegiatan . Program kegiatan yang dominan terhadap pencapaian sasaran tersebut yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama yang terkait dengan peningkatan kontribusi sektor perikanan adalah seperti pada tabel 2.3. Berdasarkan data diatas persentase capaian terhadap Rencana Kerja tahun 2021 yaitu persentase Nilai Sakip OPD diharapkan dapat mencapai target, kemudian persentase capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) telah mencapai 108,25 % dan telah mencapai target perencanaan hal ini dipengaruhi oleh beberapa program kegiatan telah melampaui target indikator kinerja. Kemudian % ASN rata-rata memiliki nilai SKP Kategori Baik dimana Integritas dan Komitmen ASN untuk bekerja dan melakukan pelayanan sudah ada peningkatan.

b. Sasaran :

Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan

Sasaran ini didukung oleh Program **Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikan Budidaya** yang merupakan program prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikator kinerjanya fokus ketersediaan bahan baku pada hilirisasi produk. Program ini dikembangkan agar terjadi peningkatan produktivitas produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi baik pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan usaha garam dan pengembangan usaha pengolahan sampai tahun 2029.

Tabel 2.4
Sasaran meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2024	2025*	2024	2025*	2024	2025*	
2.1	Sasaran : Meningkatnya jumlah produksi produktivitas perikanan	Produksi Perikanan (ton)	4.779.259,3	4.765.416	4.825.587,5	5.354.331,44	100,9	112,36 %	
		Kontribusi PDRB Perikanan (%)	10,5		7,8	-	74,3		
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran							Predikat sangat baik	

Adapun tujuan sasaran adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Peluang pengembangan budidaya dan perikanan tangkap berupa inovasi teknologi yang dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memfasilitasi pelayanan kepada pembudidaya dan nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana perikanan. Pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Bone, Luwu, Takalar, kabupaten Pangkep,

kabupaten dan Luwu Timur.

c. Sasaran :

Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan

Tahun 2025 konsumsi ikan meningkat mencapai kg/kap dari tahun 2024 yang telah mencapai kg/kap dan di tahun 2024 konsumsi ikan di Sulawesi Selatan diharapkan dapat meningkat lagi. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2025 telah mencapai 56,39 kg/kap (Data KKP) menargetkan pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2025 sebesar 59,50 kg/kap dan terealisasi sebesar 68,30 kg/kap . Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

Tabel 2.5
Sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2024	2025*	2024	2025*	2024	2025*	
2.2	Sasaran : Meningkatkan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Jumlah konsumsi ikan	72.48	74.70	72.60		117	-	Data tahun 2025 masih data sementara
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran								Predikat sangat baik

d. Sasaran :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Pada tahun 2025 telah diupayakan perbaikan sarana dan prasarana di daerah-daerah pesisir dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir, sehingga kemajuan akses masyarakat yang berada di pulau-pulau dan wilayah pesisir terhadap pembangunan dapat berkembang lebih baik. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi sarana tambatan perahu. Pada tahun 2025 ditargetkan Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan yang telah mencapai 68% sampai akhir anggaran tahun 2025. Begitu strategis dan tingginya potensi bahari yang dimiliki Sulawesi Selatan, menjadi hal penting bagaimana daerah ini dapat memberdayakan desa pesisir yang tersebar di beberapa kabupaten/kota sehingga berdampak pada pencapaian Nilai Tukar Nelayan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN pada tahun 2025 telah mencapai diharapkan tahun 2026 dapat mencapai

peningkatan.

Tabel 2.6
Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2024	2025*	2024	2025*	2024	2025*	
2.3	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan	NilaiTukar Nelayan (NTN)	102.37	103.19	107.43	109.64*	102.07	105.05*	Data Tahun 2022 adalah data sampai bulan Mei
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						102.7	105.05	Predikat sangat baik

e. Sasaran :

Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara Berkelanjutan. Penghitungan realisasi dilakukan dengan **menjumlahkan total luas kawasan konservasi yang telah /proses SK Menteri Kelautan dan Perikanan**. Indikator ini mendukung program utama sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada **Ekonomi Biru atau Pengelolaan laut yang berkelanjutan** dimana perluasan kawasan konservasi bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir dan laut, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir.

Pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan seluas 849.969.66 Ha dengan ditetapkannya 13 Kawasan konservasi sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2022 yaitu KKP3K Lanyukang, KKP3K Pulau Sembilan, KKP3K Kepulauan Tanakeke, KKP3K Pulau Pannikiang, KKP3K Liukang Tangaya, KKM Pembuatan Kapal Phinisi, KKPD Teluk Bone, KKPD Bilongka, KKPD Liukang Tuppabiring, KKPD Pulau Pasi Gusung, KKPD Kauna Kayuadi, KKPD Tanalili dan KKPD Malili kemudian rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pencapaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan akan meningkat drastis dengan penetapan teluk Bone sebagai Kawasan Konservasi melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat masih berproses. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem,

jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ekosistem dan habitat laut. Indikator ini didukung oleh Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K Prov. Sulsel, Penyusunan Regulasi Pengelolaan kawasan Konservasi dan Penataan Ruang Laut, pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Bosowasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan.

**Cakupan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				2024		
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian
Luas Kawasan Konservasi yang telah SK Menteri	*	*	569.269,6	569.269,6	578.435,53	816.593,3	70,83
Daerah Perlindungan Laut (DPL)	*	*	223,57	296,73	306,96	357,89	85,77
Total Luas Kawasan Konservasi sesuai Perda (Ha)	*	*	849.969,66	849.969,66	849.969,66	*	*
Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	*	*	67,0	67,01	68,09	96,08	70,84

Selain itu upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi dilakukan upaya rehabilitasi melalui rehabilitasi mangrove sebagai daerah perlindungan laut (DPL) dimana tahun 2024 telah dilakukan rehabilitasi mangrove sekitar 332.435 batang dengan luas 10,23 Ha. Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ekosistemnya rusak yang Pulih kembali karena dilakukan rehabilitasi ekosistem.

a. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

**Tabel 2.21
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Biologis Yang Aman
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
JumlahTangkapan Ikan	Ton	389,208.2	417,410.7	436,735.7	504,735.7	511,356.4
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari	Ton	743,776	743,776	743,776	743,776	743,776

Capaian	%	52,33	56,12	58,7	67,9	68,8
---------	---	-------	-------	------	------	------

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020, jumlah tangkapan ikan mengalami rata-rata pertumbuhan sampai tahun 2024 sebesar 7,2 % dan mengalami penurunan 0,11% pada tahun 2020 karena dampak pandemik Covid-19 . Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk propinsi sebesar 743,8 ribu ton per tahun. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan masih < 743,8 ribu ton per tahun.

b. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Tabel 2.21
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Realisasi tahun				Tahun 2024			Akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	63,07	69,18	94,01	56,35	48,97	97,80	50,07	100	48,97

Ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pemenuhan dokumen perizinan tidak ada/tidak lengkap/masa berlaku habis pelaku usaha belum memahami pemenuhan standar/aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku, beralihnya proses perizinan yaitu melalui OSS dan tidak adanya aksesibilitas untuk mengurus perizinan. Sesuai dengan PP no 5 tahun 2021 Pasal 6 ayat 2 perizinan usaha berdasarkan risiko diberlakukan untuk 16 bidang usaha termasuk kelautan dan perikanan. Diperlukan strategi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha atas peralihan pengurusan dokumen perizinan yaitu dilaksanakan

fasilitasi Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memberikan informasi, sosialisasi pemenuhan dokumen kapal, membantu nelayan mengakses pelayanan melalui Gerai Perizinan yang ada di Pelabuhan Perikanan nelayan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang masih baru dengan melibatkan penyuluh setenpat untuk pemenuhan standar /aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha (perdirjenPSDKP nomor 21 tahun 2021). Tahun 2024 jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 748 pelaku usaha dengan 536 diantaranya merupakan pelaku usaha yang patuh. Terdiri dari 6 komponen pelaku usaha yaitu 1) pelaku usaha pemanfaat ruang laut, 2) pelaku usaha perikanan tangkap 12 mil, 3) pelaku usaha pembudidaya laut, 4) pelaku usaha perikanan tangkap di PUD, 5) pelaku usaha pembudidaya di PUD dan 6) pelaku usaha pemasaran dan pengolahan.

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan tangkap berkelanjutan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap cara penanganan ikan di atas kapal dan peningkatan kapasitas nelayan. Adapun data kinerja selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26
Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2024 mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target produksi perikanan tangkap (ton)	389,052.40	396,992.30	404.932,2	413.030,8	442.959.6
Realisasi produksi perikanan tangkap (ton)	389,208.2	417.410,7	436.749,6	504,705.3	511,356.4
Capaian Kinerja (%)	100.04	105.14	107,86	122,2	115,4
Target Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	8,675.44	8,852.48	9.029.52	9.210,12	11,933.56
Realisasi Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	8,678.9	10,679,9	11.812,9	13,795.8	13,836.3
Capaian Kinerja (%)	100.04	120.64	130,83	149.78	115.94

Sumber : Data olahan *) Data KKP

Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata **sebesar 7,2%**, dimana produksi perikanan tangkap pada **tahun 2020 sebesar 366,540.6 ton meningkat pada tahun 2021 menjadi 417,410.7 ton, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar 436,735.7 ton** pada tahun 2023 meningkat sebesar 504,705.3 ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 511,356.4 ton.

Pelabuhan memenuhi standar operasional jika memenuhi minimal 3 standar operasional yang dipersyaratkan antara lain yaitu telah operasional, penetapan kelas oleh kementerian, memiliki kelembagaan, memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran, menyusun wkopp dan menerapkan CPIB. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 19 pelabuhan perikanan dengan yang memenuhi standar operasional sebanyak 17 pelabuhan.

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi budidaya ikan ramah lingkungan, pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap cara budidaya ikan dengan baik dan peningkatan kapasitas pembudidaya. Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar **3,9 %**, dimana produksi perikanan budidaya **pada tahun 2020 sebesar 3,713,111.3 ton, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,081,480.5 ton, pada tahun 2022 produksi mengalami kenaikan menjadi 4,095,934.7 ton, pada tahun 2023 produksi Perikanan budidaya mengalami peningkatan menjadi 4,115,586.5 dan tahun 2024 meningkat menjadi 4,314,231.1 ton**

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program ini berinisiasi untuk melakukan harmonisasi dan sinergi sesuai kewenangan yang telah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014. Pada program ini dilaksanakan dengan intervensi program ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menyediakan sarana dan prasarana wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil terutama pada pengembangan usaha garam dan sarana prasarana pendukung produksi perikanan. Adapun kinerja pemerintah dalam melaksanakan program ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24
Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2024 mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Produksi Garam (ton)	45.846	46.500	47.500	48.450	5.000
Realisasi Produksi Garam (ton)	45.310,5	4.842,02*	6.506,75*	114,959.9	48,018.5
Capaian Kinerja Produksi Garam (%)	98.8	10,4	13,7	237,3	960,4
Target Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (%)	15,22	37,5	68,75	100	56,69 %
Realisasi Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (%)	7,27	9,09	33,33	50,51	54,21
Capaian Kinerja (%)	21,7	64,43	66,81	50,51	95,28

Sumber : Data olahan, *) Data KKP

Pada tabel dapat dilihat bahwa produksi garam mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 hal ini disebabkan adanya perubahan iklim pada bulan produksi. Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan gagal produksi pada tambak di 5 kabupaten (Jeneponto, Takalar, Selayar, Maros dan Pangkep). Sehingga performance pada indikator kinerja program ini sangat kurang pada tahun 2021, 2022 dan 2024, oleh karena itu dibutuhkan upaya perbaikan dalam mencapai kinerja. Demikian juga halnya pada indikator kinerja cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan mengalami peningkatan kinerja. Kemudian untuk mendukung sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, maka program ini melaksanakan indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.25
Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020 - 2024 mendukung sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	-	67,29	67,30	67,31	96,3
Realisasi Cakupan luas kawasan	-	67,29	67,29	67,30	68,09

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)					
Capaian Kinerja (%)	-	100	99,98	99,98	70.84

Sumber : Data olahan

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan arah kebijakan terkait perluasan kawasan konservasi yang didukung oleh kegiatan pemantauan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut dengan fokus cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Bosowasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan.

Capaian Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan laut sampai dengan 12 mil, penangkapan ikan, budidaya dan pengolahan serta pemasaran. Adapun data kinerja selama tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27
Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024
mendukung sasaran Meningkatnya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan

No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa					Persentase Kepatuhan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	371	357	403	554	713	63,07	63,87	81,14	77,98	72,66
2	Pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	-	-	8	7	13	-	-	100	57.14	46,15
3	Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	2	2	3	-	-	100	50,0	0
4	Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1	-	-	5	3	4	-	-	100	33,33	75,0

No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa					Persentase Kepatuhan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	(satu) daerah provinsi										
5	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	9	7	12	-	-	88,89	100	66,67
6	Pemanfaat ruang laut	-	-	-	5	3	-	-	-	20	33,33
Total pelaku usaha yang diperiksa ; Persentase kepatuhan		371	357	427	578	748	63.07	63.87	94,06	56,40	48,97

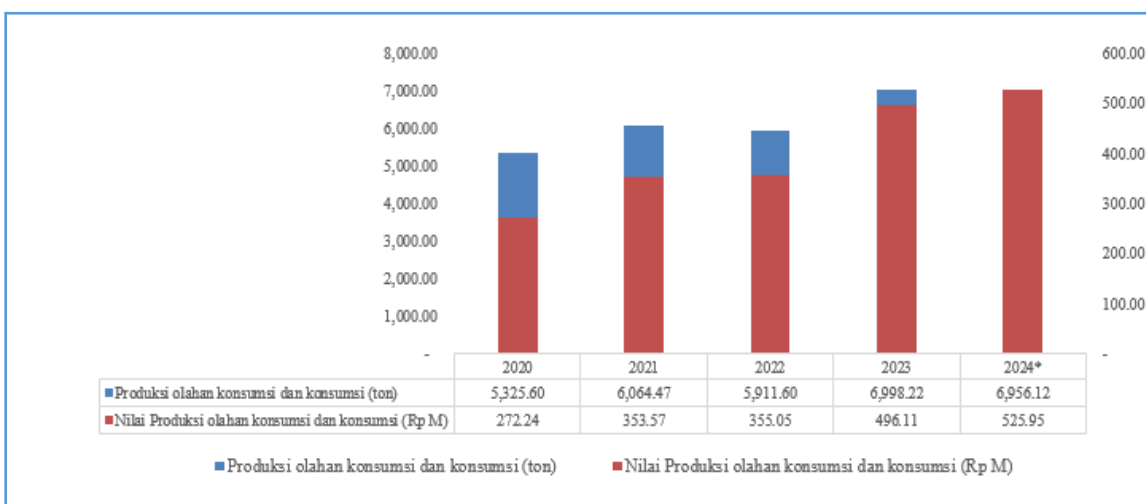
Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha pengolahan dan hasil perikanan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi diversifikasi olahan, pembinaan mutu, standar mutu, penjaminan keamanan pangan untuk konsumsi, pengawasan dan pengujian mutu.

Grafik II.9
Kinerja Produksi Olahan Ikan dan Nilai Produksi Olahan Ikan

Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat berbasis Gender

Dalam rangka mengefektifkan kinerja pelayanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target sasaran yang diinginkan. Beberapa upaya strategis dilakukan untuk mewujudkan-kannya, salah satunya adalah pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat. Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan penilaian yang sama dan diberikan pada masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta atas berbagai peran yang mereka lakukan untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender, maka persentase keterwakilan perempuan terhadap laki-laki untuk memperoleh kesempatan untuk pengembangan SDM dapat dilihat pada tampilan data pada tabel



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan Lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan melalui Forum Perangkat Daerah dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah maka dengan adanya isu-isu penting maka dapat melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti pada proses penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan juga penelaahan terhadap isu daerah dan nasional yang mempengaruhi. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika nasional dan regional.

Beberapa isu dan dokumen perencanaan lainnya yang ditelaah, meliputi:

a. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Stunting

Perubahan Iklim menimbulkan masalah yang dihadapi dalam sistem pangan, tidak hanya mengganggu rantai pasokan dan membatasi produksi pangan, tetapi juga menunjukkan berbagai aspek yang bisa mengganggu ketahanan pangan dalam jangka panjang, seperti masalah akses pangan akibat tingkat ketergantungan pasar yang tinggi dan berbagai tantangan logistik, serta masalah akses ekonomi di tengah berkurangnya daya beli masyarakat atas pangan akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

Hal ini memaksa kita untuk mencari cara-cara baru untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan. Pada bulan Desember 2023, Ekonomi Laut Berkelanjutan (Ekonomi Biru) menyoroti potensi peran laut dalam mengatasi kerawanan pangan dan malnutrisi serta mengubah sistem pangan untuk meningkatkan ketahanan terhadap goncangan dan perubahan iklim.

1. Kontribusi ikan dan pangan laut sebagai sumber protein dan nutrisi lainnya merupakan bagian penting dari pola makan masyarakat Sulawesi Selatan yang menyumbang 50 persen dari seluruh asupan protein hewani dan berperan sebagai sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi lemah. Meskipun ikan menyumbang 50 persen dari total konsumsi protein hewani, data menunjukkan bahwa asupan protein di Indonesia masih termasuk rendah berdasarkan pedoman gizi yang berlaku, terutama dibandingkan dengan konsumsi karbohidrat. Ini menjadi salah satu faktor mengapa negara kita menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang menghadapi dua permasalahan gizi buruk sekaligus, yaitu kurang gizi dan gizi berlebih yang menyebabkan **stunting**. Untuk mengatasi masalah ini, pangan laut dapat menjadi sumber protein, lemak esensial dan nutrisi yang andal untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Dengan kandungan protein yang tinggi, ikan menjadi pilihan sumber protein yang lebih baik dibandingkan daging, dan menyediakan zat gizi mikro (seperti vitamin A, B, D, dll.) yang diperlukan untuk memerangi tingginya angka stunting dan malnutrisi di negara ini. Selain itu, ikan dapat menjadi sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi rendah yang dapat diakses di pasar atau dipanen langsung di wilayah pesisir atau laut.
2. Kontribusi mata pencaharian berkelanjutan. Sektor perikanan masih menjadi sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat nelayan skala kecil, individu dan tradisional. Sekitar 90 persen nelayan di Sulawesi Selatan adalah nelayan skala kecil dan lebih dari 80 persen tangkapan ikan Sulawesi Selatan berasal dari perikanan skala kecil. Nelayan juga masih menjadi salah satu masyarakat termiskin, di mana 2,7 juta nelayan Indonesia termasuk dalam 25 persen dari total masyarakat miskin nasional dan sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Bantuan dari pemerintah yang terbatas bagi nelayan skala kecil dalam agenda perikanan nasional seringkali meninggalkan nelayan skala kecil sehingga mereka tidak dapat keluar dari **kemiskinan**. Menyediakan mata pencaharian bagi nelayan dan meningkatkan kemampuan mereka sangat penting

untuk memastikan aksesibilitas dan stabilitas ketahanan pangan bagi satu kelompok populasi yang sangat besar di Indonesia. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperhatikan nelayan perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor perikanan.

3. Kontribusi keragaman sumber pangan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan makanan darat. Sulawesi Selatan memiliki potensi untuk mengembangkan pola makan dan mata pencaharian yang lebih beragam melalui **panen dan produksi makanan dari laut**. Budidaya laut (marikultur) di Sulawesi Selatan adalah yang paling produktif dan memiliki potensi untuk mengambil peran penting dalam ketahanan pangan dan gizi, terutama untuk budidaya laut tanpa pakan (seperti rumput laut dan bivalvia). Produksi rumput laut merupakan bagian terbesar dari total produksi akuakultur di Sulawesi Selatan. Seperti organisme budidaya laut lainnya, rumput laut tidak memerlukan pakan tambahan karena mereka mengekstrak sumber makanan dari lingkungan sekitarnya sehingga biaya operasional yang dibutuhkan lebih rendah. Bivalvia laut (seperti, remis, kerang, tiram) juga merupakan sumber makanan yang berprotein tinggi dan terjangkau. Mereka juga membantu membersihkan saluran air di dalam atau ke laut dengan memakan partikel-partikel organik seperti alga berlebih.

b. Lingkungan dan pencemaran laut

Isu terkait lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang sangat mengemuka belakangan ini. Dalam proses pembangunan, seringkali kepentingan ekonomi dihadapkan dengan kepentingan lingkungan. Permasalahan lingkungan pada dasarnya adalah irisan dari permasalahan yang terjadi pada lingkungan alami (natural environment), lingkungan buatan (man-made environment) terkait aktivitas perekonomian, dan lingkungan 62ersam (social environment). Oleh sebab itu, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara bersama sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kondisi ekonomi dan yang dilakukan di Sulawesi Selatan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan di Sulawesi Selatan ditandai dengan terlampauinya daya dukung dan daya lingkungan. Saat ini yang menjadi perhatian degradasi penurunan kualitas air dan penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi kendaraan bermotor, emisi cerobong, dan emisi pembakaran sampah oleh masyarakat. Meningkatnya frekuensi dan risiko bencana di Sulawesi Selatan

sangat berkaitan dengan meningkatnya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya luas lahan kritis. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, meningkatnya kerusakan habitat tanaman dan satwa langka, dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, menyebabkan tingginya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Berkaitan dengan isu perubahan iklim yang telah berkembang menjadi isu global dan nasional, tingginya emisi gas rumah kaca diyakini secara ilmiah menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Indonesia berkomitmen untuk turut berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menetapkan target sebesar 29% melalui pendanaan dan 41% dengan tambahan pendanaan dari dukungan internasional pada Tahun 2030. Hal ini ditegaskan dengan diratifikasinya Paris Agreement melalui penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Sulawesi Selatan

c. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan 63ersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun dari 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan didukung oleh sektor Kelautan dan Perikanan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

d. Transformasi Digital

Digitalisasi terus berkembang pesat di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat global, nasional, maupun lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, di seluruh provinsi di Indonesia, secara rata-rata 44,5% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Sementara itu, di Sulawesi Selatan sendiri, secara rata-rata 43,91% penduduk merupakan pengguna internet. Lebih jauh, sektor telekomunikasi di Sulsel tumbuh 6,4% pada tahun 2025. Digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat diharapkan bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui optimalisasi teknologi tepat guna sehingga bisa meningkatkan produktivitas lapangan usaha, penyediaan akses informasi secara cepat dan efektif sehingga bisa menurunkan biaya transaksi, maupun pembukaan akses informasi dan pemasaran sehingga para pelaku usaha, termasuk UMKM, bisa terintegrasi dengan pasar global. Namun demikian, adopsi digital oleh lapangan usaha belum secepat yang diharapkan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah adanya isu strategis dan permasalahan pada sektor kelautan dan Perikanan yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan hukum (law enforcement); dan 3) pelaku usaha perikanan 4) Hilirisasi hasil perikanan. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan Hal ini telah diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Sulawesi Selatan

Sebagai contoh untuk perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala padat tangkap (overfishing), seperti Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu yang mengalami over-exploitation, nelayan-nelayannya umumnya menjadi miskin, karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu pula, sangat rawan terjadinya konflik antar nelayan di perairan tersebut. Disisi lain, pada daerah-daerah penangkapan ikan

yang tingkat pemanfaatannya belum optimal atau underfishing, sumber daya ikan yang bernilai tersebut terkesan dibuang begitu saja, bahkan di beberapa perairan, yang memanfaatkannya adalah kapal-kapal perikanan illegal dari negara lain.

Untuk contoh perikanan budidaya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan nasional akan benih dan pakan seringkali tidak mencukupi, sehingga aktivitas perikanan budidaya, sebagian masih tergantung dengan negara lain yang tentunya akan mengancam keberlanjutan usaha para pembudidaya ikan nasional. Kenyataan seperti tersebut di atas sebagai cerminan bahwa betapa belum kuatnya pengelolaan perikanan nasional, sehingga pemerintah perlu segera menata dan memperbaiki kelemahan yang ada sekarang dengan melakukan penguatan kebijakannya.

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan terutama di Sulawesi Selatan juga relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian negara, baik secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Contoh utama akibat belum tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah maraknya kegiatan IUU fishing yang jelas-jelas menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan. Sementara dibidang perikanan budidaya adalah masalah peraturan tata ruang yang sering kali dilanggar atau tidak dipatuhi tanpa ada tindakan yang tegas dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Bahkan tidak sedikit aturan tata ruang diganti atau disesuaikan dengan kepentingan pribadi atau kelompok penguasa. Isu strategis lainnya adalah pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak (economy of scale). Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan, dan manusianya. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya.

Produk perikanan yang dihasilkan pelaku usaha perikanan dirasa masih sulit menembus pasar karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi masih belum stabil. Volume produksi masih dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pengetahuan dan

kapabilitas di bidang manajemen, akses terhadap informasi pasar, akses permodalan, teknologi dan sumberdaya manusia (SDM).

e. Permasalahan Internal Organisasi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Lingkungan strategis mencakup berbagai faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan dinamika sosial-politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kelautan dan perikanan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :

1. Bergesernya proses pengadaan barang dan jasa, tender/lelang sehingga pelaksanaan kegiatan tidak selesai tepat waktu;
2. Kebutuhan Bahan Bakar untuk operasional kegiatan baik darat maupun di laut terbatas karena anggaran tidak tersedia akibat refocusing anggaran;
3. Pendampingan dan pembinaan pada masyarakat terbatas karena tidak tersedianya anggaran;
4. Unit kerja masih belum memahami pencapaian indikator kinerja sehingga masih terdapat target indikator yang belum tercapai;
5. Unit kerja belum memahami target indikator yang berdampak hasil (outcomes) sehingga penerapan kebijakan pemerintah yaitu Quick Wins (perubahan yang terjadi pada masyarakat) belum sepenuhnya tercapai.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: - Kurangnya kegiatan yang sifatnya padat karya, penguatan iklim investasi dalam menghadapi pasar baik local maupun global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Selain itu Adapun dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

(Sustainable Development Goals) maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2004 mempedomani NSPK dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan belum termasuk Perangkat Daerah yang memiliki SPM namun dalam penyelenggaraan pelayanan tetap melaksanakan kinerja pelayanan dan mendukung tujuan pembangunan SDGs. Adapun pencapaian program internasional yang didukung oleh sektor kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Evaluasi Pencapaian SDGs Sektor Kelautan

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	target (2025)	Realisasi	Keterangan
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN						
TARGET 14. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.						
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DKP Prov Sulsel	%	82	50,59	Realisasi lebih rendah dari target , hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah yang diawasi, adanya indikator pendukung lainnya yang capaiannya sangat rendah persentasenya yaitu Pelaku Usaha Pembudidaya Laut dikarenakan tidak memiliki KKPRL , Nelayan di Wilayah PUD yang tidak memiliki NIB sedangkan persentase kepatuhan nelayan di wilayah laut tercapai 86%, faktor lainnya adalah adanya pemanfaatan Ruang Laut (RL) yang tidak memiliki izin RKKPRL sehingga tidak sesuai dengan regulasi.kebijakan untuk pemanfaatan Ruang Laut
TARGET 14. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.						

14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	DKP Prov Sulse	Regulasi/ Kebijakan	1	1	-
Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	target (2025)	Realisasi	Keterangan
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	DKP Prov Sulse	Kab/ Kota	19	19	
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP Prov Sulse	Nelayan	10,000	10,000	,-
14.b.1.(b)	Persentase Angka Konsumsi Ikan	DKP Prov Sulse	%	73,50	72,9	Realisasi tidak memenuhi target disebabkan keterkaitan dnegan peningkatan produksi hasil penangkapan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 0,21%

Pencapaian target indikator SDGs yaitu :

1. Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2022 sebesar 69.18 % masih belum mencapai target sebesar 87.48 namun diupayakan pada tahun 2023 telah mencapai target akhir Renstra.
2. Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil pada tahun 2022 ditetapkan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan tanggal 9 Juni 2020;
3. Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 19 kabupaten/kota memiliki hak akses dalam permodalan dan pendanaan untuk pengembangan usaha seperti KUR dan Jaminan dalam berusaha melalui pelayanan kartu KUSUKA;
4. Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang) yaitu nelayan mendapatkan jaminan asuransi

dalam melakukan usahanya dimana pada tahun 2022 sebanyak 11.827 orang dan pada diupayakan tahun 2023 dapat mencapai target.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

a. Peluang

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah situasi pertumbuhan ekonomi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara pusat dengan kabupaten/kota dan mitra usaha, sehingga secara harmonisasi dapat mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Tantangan

- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Kurangnya literasi baik pemerintah maupun masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Adanya peluang dan tantangan tersebut maka dapat diformulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehingga jika

dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan maka dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pemetaan Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

Isu Strategis Nasional	Permasalahan	STRATEGI	KEBIJAKAN
Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia 2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan 3. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi 4. Tingginya angka stunting 	Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi local	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan hasil produksi perikanan • Peningkatan bantuan sarana dan prasarana • Pengembangan sektor unggulan sesuai dengan permintaan pasar
Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA 	Pengembangan sektor Kelautan dan perikanan yang mandiri, inovatif, berdayasaing dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang inovatif akan teknologi • Pengembangan potensi perikanan dan kelautan berbasis wilayah dan berkelanjutan • Peningkatan usaha alternatif minat masyarakat pesisir • Penerapan pola Kemitraan usaha perikanan • Peningkatan manajemen dan kinerja pelaku Usaha perikanan (Aparatur Sipil Daerah dan Masyarakat pelaku usaha perikanan)
Lingkungan dan Pencemaran Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran Sampah Plastik 2. Pencemaran limbah kapal di laut 3. Pencemaran Limbah organic 4. Mitigasi bencana Belum Optimal 	Kebijakan dalam pengawasan, Pengendalian, Pembinaan dan edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah dengan mengefektifkan Bank Sampah • Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya plastik dan pentingnya daur ulang. • Pelarangan penggunaan bahan kimia beracun dan meningkatkan pengolahan limbah industri. • Perlindungan dan restorasi habitat pesisir seperti mangrove dan terumbu karang serta mengadopsi energi terbarukan untuk mengurangi emisi.

SDGs	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	Pengembangan sumberdaya kelautan merujuk kebijakan pemerintah dan kelembagaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kelembagaan masyarakat usaha perikanan • Pengembangan potensi pelabuhan perikanan • Pengembangan potensi industri maritim • Restrukturisasi armada perikanan tangkap • Pengembangan informasi dan jaringan pasar
Transformasi Digital	Masih rendahnya keterampilan Angkatan Kerja	Pengembangan inovasi sarana dan prasarana usaha perikanan berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir dan pengarusutamaan gender (PUG) • Penerapan inovasi sarana prasarana usaha perikanan • Penerapan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam pengembangan usaha perikanan
Internal Organisasi	Rendahnya capaian realisasi program kegiatan	Penataan dan penerapan manajemen organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan metode Sistem Kerja • Penyusunan Proses Bisnis • Melakukan analisis <i>Critical Succes Factor (CSF)</i>

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025-2029

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk

memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah dan arahan KLHS yaitu :

Tabel 2.11

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Visi/Misi/ Sasaran RPJMD	Pemasalahan Pembangunan Daerah (RPJMD) yang relevan dengan pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan Dinas kelautan dan perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Visi Sulawesi Selatan : "SULAWESI SELATAN MAJU DAN BERKARAKTER" Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	- Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif dan agile (tangkas)	- Kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan	- Jumlah dan kualitas SDM, dan Sarana prasarana pendukung operasional yang modern belum optimal	Kebijakan dan dukungan anggaran
	- Produktivitas ekonomi yang belum optimal	- Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	- Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi
	- Pendapatan perkapita masih rendah dan tidak merata - Masih tingginya kemiskinan	- Pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang masih dibawah standar	- Belum menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan ikan yang Baik (CPIB), Akses pasar, kualitas Sumberdaya Manusia, Prasarana yang belum memadai	Kebijakan dan dukungan anggaran dan potensi Sumber Daya Alam
	- Daya saing daerah belum optimal - Integrasi ekonomi dan global masih lemah	- Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing - Belum optimalnya nilai ekspor karena masih berupa bahan mentah	- Masih terbatasnya Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan	Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor

Visi/Misi/ Sasaran RPJMD	Pemasalahan Pembangunan Daerah (RPJMD) yang relevan dengan pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan Dinas kelautan dan perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kualitas lingkungan hidup - Belum optimalnya penerapan ekonomi biru 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan belum optimal, SDM pengawas dan sarpras pengawasan belum optimal - Efektivitas pnegelolaan kawasan konservasi masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing - konflik kepentingan di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai - Degradasi ekosistem pesisir (terumbu karang , mangrove dan padang lamun) 	Keterlibatan semua unsur <i>stakeholder</i> dalam pengawasan dan pengelolaan SDKP Penyusunan RAD terkait pengelolaan dan pemanfaatan pesisir

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan di masa lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang terdapat dalam berbagai dokumen perencanaan strategis di Sulawesi Selatan menjadi elemen penting dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis termasuk isu-isu strategis terkait tata ruang wilayah menjadi dasar untuk menyelaraskan pembangunan dengan potensi dan kapasitas ruang. RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 merumuskan isu-isu strategis jangka panjang yang mencerminkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. RPD Tahun 2024-2026 memberikan panduan isu-isu prioritas dalam jangka menengah, sedangkan dokumen KLHS mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang menjadi dasar untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Keselarasan antara isu-isu strategis dari berbagai dokumen ini dengan isu-isu nasional menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang holistik dan terintegrasi

. Oleh karena itu Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Untuk tahun 2025 fokus pada ketahanan pangan dan pengendalian inflasi , penanganan kemiskinan, penanganan stunting dan pengendalian inflasi. Arahan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. Kualitas pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan, sedangkan pemerataan pembangunan pada semua sektor pembangunan di kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki setiap daerah; **Kualitas pertumbuhan** diarahkan pada pertumbuhan sektor unggulan, yang dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pengelolaan SDA khususnya pada sektor perikanan dan industri pengolahan, diharapkan memicu pertumbuhan sektor unggulan lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi barang dan jasa dibutuhkan

dukungan investasi; **Optimalisasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan** menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.

b. Bentuk amanah yang tertuang dalam Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 untuk sektor Perikanan terdapat **program Prioritas :**

1. Tematik Penanganan Kemiskinan

- Pengembangan Rumah Ikan dan Terumbu Buatan
- Pengembangan Kolam Terpal Budidaya Ikan Air Tawar
- Pengembangan komoditas unggulan Rumput Laut dan komoditas lainnya yang bernilai ekonomis

2. Tematik Penurunan Stunting

- Dukungan peningkatan kompetensi dan pengujian mutu produk hasil perikanan, dan sertifikasi produk untuk mendukung ekspor hasil perikanan Sulsel
- Pameran dan Promosi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Nasional/Daerah

3. Tematik Pengendalian Inflasi

- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

4. Tematik Ketahanan Pangan

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- Penjaminan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Tersedia dan beroperasinya kendaraan berpendingin Untuk Mendukung Kualitas dan daya saing produk perikanan)
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

5. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Agar Rencana program kegiatan lebih terarah dan konsisten terhadap dokumen RPJMD/RPD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 maka review rancangan awal disajikan dalam bentuk tabel 2.9 atau Tabel C-31 sesuai lampiran permendagri 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan :

- Indikator pada program kegiatan agar lebih tajam dan tepat sasaran terutama pada program teknis.
- Penetapan pagu per kegiatan harus memperhatikan target indikator jika pagu berkurang maka dilakukan penyesuaian target indikator, perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
- Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan

Oleh karena itu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda dan Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

Tabel 2.11
(Tabel T-C 31, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan
Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL AWAL KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Lokasi	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Lokasi	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				80.783.454.312,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				80.783.454.312,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100,0	31.081.056.312,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100,0	31.081.056.312,00
3.25.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,0	31.081.056.312,00	3.25.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,0	31.081.056.312,00
Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	294.501.700,00	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	294.501.700,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	294.501.700,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	294.501.700,00

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	
3.25.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.25.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	9.575.500,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	9.575.500,00
3.25.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9.575.500,00	3.25.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9.575.500,00

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.955.200,00	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.955.200,00
3.25.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.955.200,00	3.25.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.955.200,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.600.800,00	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.600.800,00
3.25.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.600.800,00	3.25.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.600.800,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.200.000,00	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.200.000,00

3.25.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.200.000,00	3.25.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.200.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.233.500,00	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.233.500,00
3.25.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.233.500,00	3.25.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.233.500,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	185.909.600,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	185.909.600,00
3.25.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			185.909.600,00	3.25.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			185.909.600,00

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	28.971.800,00	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	28.971.800,00
3.25.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			28.971.800,00	3.25.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			28.971.800,00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4	34.655.300,00	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4	34.655.300,00
3.25.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			34.655.300,00	3.25.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			34.655.300,00
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	8.400.000,00	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	8.400.000,00

3.25.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.400.000,00	3.25.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.400.000,00
Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	315	27.435.056.787,00	Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	315	27.435.056.787,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	27.435.056.787,00			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	27.435.056.787,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	
3.25.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	315	27.414.432.137,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	315	27.414.432.137,00

3.25.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			27.414.432.137,00	3.25.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			27.414.432.137,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	763.300,00	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	763.300,00
3.25.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			763.300,00	3.25.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			763.300,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	540.900,00	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	540.900,00
3.25.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			540.900,00	3.25.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			540.900,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	828.800,00	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	828.800,00

3.25.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			828.800,00	3.25.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			828.800,00
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	676.250,00	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	676.250,00
3.25.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			676.250,00	3.25.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			676.250,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	17.336.600,00	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	17.336.600,00
3.25.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			17.336.600,00	3.25.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			17.336.600,00

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	478.800,00	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	478.800,00
3.25.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			478.800,00	3.25.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			478.800,00
Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	9.268.300,00	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	9.268.300,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	9.268.300,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	9.268.300,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	

		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	
3.25.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3.25.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	228.300,00	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	228.300,00
3.25.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				228.300,00	3.25.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				228.300,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	4.782.000,00	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	4.782.000,00
3.25.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4.782.000,00	3.25.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4.782.000,00

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	2.141.000,00	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	2.141.000,00
3.25.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.141.000,00	3.25.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.141.000,00
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2.117.000,00	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2.117.000,00
3.25.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.117.000,00	3.25.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.117.000,00
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0,00	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0,00
3.25.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0,00	3.25.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0,00

Persentase capaian target pendapatan perangkat daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	8.273.200,00	Persentase capaian target pendapatan perangkat daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	8.273.200,00
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	8.273.200,00			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	8.273.200,00
3.25.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.25.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	7.265.200,00	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	7.265.200,00
3.25.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.265.200,00	3.25.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.265.200,00
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1.008.000,00	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1.008.000,00
3.25.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.008.000,00	3.25.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.008.000,00

Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	80.933.400,00	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	80.933.400,00
	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	80.933.400,00		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	80.933.400,00
	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12			Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	
	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	
	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	

3.25.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3.25.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	6.849.600,00	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	6.849.600,00
3.25.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.849.600,00	3.25.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.849.600,00
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	14.857.800,00	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	14.857.800,00
3.25.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14.857.800,00	3.25.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14.857.800,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	200.000,00	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	200.000,00

3.25.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200.000,00	3.25.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200.000,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	49.026.000,00	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	49.026.000,00
3.25.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			49.026.000,00	3.25.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			49.026.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	10.000.000,00	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	10.000.000,00
3.25.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10.000.000,00	3.25.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10.000.000,00

Persentase penyediaan layanan umum kantor	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	160.531.000,00	Persentase penyediaan layanan umum kantor	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	160.531.000,00
	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	160.531.000,00		Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	160.531.000,00
	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17			Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	
	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3			Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	
	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	

	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	
3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	6.269.200,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	6.269.200,00
3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.269.200,00	3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.269.200,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	40.252.300,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	40.252.300,00
3.25.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.252.300,00	3.25.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.252.300,00

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.956.800,00	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.956.800,00
3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.956.800,00	3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.956.800,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	23.590.000,00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	23.590.000,00
3.25.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				23.590.000,00	3.25.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				23.590.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.047.900,00	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.047.900,00
3.25.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10.047.900,00	3.25.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10.047.900,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	78.040.200,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	78.040.200,00
3.25.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			78.040.200,00	3.25.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			78.040.200,00

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	374.600,00	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	374.600,00
3.25.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			374.600,00	3.25.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			374.600,00
Persentase Pengadaan BMD	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	47.000.000,00	Persentase Pengadaan BMD	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	47.000.000,00
	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	47.000.000,00		Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	47.000.000,00
	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1			Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	

3.25.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3.25.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Tersedianya Mebel	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	5.000.000,00	Tersedianya Mebel	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	5.000.000,00
3.25.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5.000.000,00	3.25.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00
3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10.000.000,00	3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10.000.000,00

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	32.000.000,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	32.000.000,00
3.25.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo, Semua Kelurahan			32.000.000,00	3.25.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo, Semua Kelurahan			32.000.000,00
Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	2.778.964.925,00	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	2.778.964.925,00
	Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	2.778.964.925,00		Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	2.778.964.925,00
	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12			Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	
3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	826.835.925,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	826.835.925,00
3.25.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			826.835.925,00	3.25.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			826.835.925,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	7.100.000,00	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	7.100.000,00
3.25.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangkajene Kepulauan,			7.100.000,00	3.25.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangkajene Kepulauan,			7.100.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	1.945.029.000,00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	1.945.029.000,00
3.25.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan			1.945.029.000,00	3.25.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan			1.945.029.000,00

Persentase terpeliharanya BMD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	266.527.000,00	Persentase terpeliharanya BMD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	266.527.000,00
	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	266.527.000,00		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	266.527.000,00
	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1			Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	
	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	
	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17			Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	

	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10			Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	
3.25.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	66.527.000,00		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	66.527.000,00
3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			66.527.000,00		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			66.527.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	30.000.000,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	30.000.000,00

3.25.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30.000.000,00	3.25.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	20.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	20.000.000,00
3.25.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20.000.000,00	3.25.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00
3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5.000.000,00	3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5.000.000,00

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	125.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	125.000.000,00
3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.000.000,00	3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	20.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	20.000.000,00
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20.000.000,00	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20.000.000,00
Meningkatnya perlindungan laut dan sumberdayanya melalui pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan (%)	99,66	5.651.892.184,00	Meningkatnya perlindungan laut dan sumberdayanya melalui pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan (%)	99,66	5.651.892.184,00
3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				5.651.892.184,00	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				5.651.892.184,00

Persentase kawasan konservasi yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru (Pelaku Usaha)	30	3.717.783.000,00	Persentase kawasan konservasi yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru (Pelaku Usaha)	30	3.717.783.000,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	3	3.717.783.000,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	3	3.717.783.000,00
		Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan (Dokumen)	1				Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan (Dokumen)	1	
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Volume produksi garam lokal pada SEGAR (Ton)	49.921,8				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Volume produksi garam lokal pada SEGAR (Ton)	
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP (Dokumen)	1			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP (Dokumen)	1	
		Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia (Dokumen)	1				Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia (Dokumen)	1	

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi (Kegiatan)	0
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam (Kelompok)	3
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orang)	50
		Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan (Kelompok Masyarakat)	7
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	63.447,23

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi (Kegiatan)	0
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam (Kelompok)	3
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orang)	50
		Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan (Kelompok Masyarakat)	7
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	63.447,23

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	43,60			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	43,60	
3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat					3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				
Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	63.447,23	338.272.000,00	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	63.447,23	338.272.000,00
3.25.02.1.01.0003 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				338.272.000,00	3.25.02.1.01.0003 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				338.272.000,00
Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	43,60	2.706.136.000,00	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	43,60	2.706.136.000,00
3.25.02.1.01.0004 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				2.706.136.000,00	3.25.02.1.01.0004 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				2.706.136.000,00
Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orang)	50	10.820.000,00	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orang)	50	10.820.000,00

3.25.02.1.01.0005 - Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/
Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K
3.25.02.1.01.0006 - Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
3.25.02.1.01.0007 - Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia
Terselenggaranya kegiatan turnamen memancing secara berkala di wilayah perairan yang menjadi kewenangan Provinsi

			10.820.000,00	3.25.02.1.01.0005 - Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/
Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	3		320.245.000,00	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)
			320.245.000,00	3.25.02.1.01.0006 - Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP (Dokumen)	1		30.000.000,00	Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
			30.000.000,00	3.25.02.1.01.0007 - Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia
Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi (Kegiatan)	0		0,00	Terselenggaranya kegiatan turnamen memancing secara berkala di wilayah perairan yang menjadi kewenangan Provinsi

Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	3		320.245.000,00	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)
			320.245.000,00	3.25.02.1.01.0006 - Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP (Dokumen)	1		30.000.000,00	Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
			30.000.000,00	3.25.02.1.01.0007 - Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia
Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi (Kegiatan)	0		0,00	Terselenggaranya kegiatan turnamen memancing secara berkala di wilayah perairan yang menjadi kewenangan Provinsi

3.25.02.1.01.0008 - Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			0,00	3.25.02.1.01.0008 - Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		30	6.120.000,00	Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
3.25.02.1.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan			6.120.000,00	3.25.02.1.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan
Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan		1	22.700.000,00	Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan
3.25.02.1.01.0010 - Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon			22.700.000,00	3.25.02.1.01.0010 - Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon
Meningkatnya kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan		7	70.000.000,00	Meningkatnya kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan (Kelompok Masyarakat)

			0,00	3.25.02.1.01.0008 - Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru (Pelaku Usaha)		30	6.120.000,00	Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
			6.120.000,00	3.25.02.1.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan
Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan (Dokumen)		1	22.700.000,00	Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan
			22.700.000,00	3.25.02.1.01.0010 - Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon
Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan (Kelompok Masyarakat)		7	70.000.000,00	Meningkatnya kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan

			0,00	
Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru (Pelaku Usaha)		30	6.120.000,00	
			6.120.000,00	
Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan (Dokumen)		1	22.700.000,00	
			22.700.000,00	
Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan (Kelompok Masyarakat)		7	70.000.000,00	

3.25.02.1.01.0011 - Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam			70.000.000,00	3.25.02.1.01.0011 - Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam		3	8.990.000,00	Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam (Kelompok)
3.25.02.1.01.0012 - Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			8.990.000,00	3.25.02.1.01.0012 - Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		49.921,8	203.500.000,00	Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
3.25.02.1.01.0015 - Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman			203.500.000,00	3.25.02.1.01.0015 - Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman
Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman		1	1.000.000,00	Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman (Dokumen)
3.25.02.1.02 - Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			1.000.000,00	3.25.02.1.02 - Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Persentase izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar Minyak dan gas bumi yang diterbitkan		1	1.278.000,00	Persentase izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar Minyak dan gas bumi yang diterbitkan (Dokumen)

			70.000.000,00	3.25.02.1.01.0011 - Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam (Kelompok)	3		8.990.000,00	Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
			8.990.000,00	3.25.02.1.01.0012 - Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
Volume produksi garam lokal pada SEGAR (Ton)	49.921,8		203.500.000,00	Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
			203.500.000,00	3.25.02.1.01.0015 - Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman
Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia (Dokumen)	1		1.000.000,00	Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman
			1.000.000,00	3.25.02.1.02 - Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan (Dokumen)	1		1.278.000,00	Persentase izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar Minyak dan gas bumi yang diterbitkan

			70.000.000,00	3.25.02.1.01.0011 - Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam (Kelompok)	3		8.990.000,00	Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
			8.990.000,00	3.25.02.1.01.0012 - Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
Volume produksi garam lokal pada SEGAR (Ton)	49.921,8		203.500.000,00	Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
			203.500.000,00	3.25.02.1.01.0015 - Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman
Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia (Dokumen)	1		1.000.000,00	Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman (Dokumen)
			1.000.000,00	3.25.02.1.02 - Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan (Dokumen)	1		1.278.000,00	Persentase izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar Minyak dan gas bumi yang diterbitkan

3.25.02.1.02.0006 - Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha
Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha
3.25.02.1.03 - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktif dalam pengelolaan SD kelautan dan perikanan

		1.278.000,00	3.25.02.1.02.0006 - Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha
Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan (Dokumen)	1	1.278.000,00	Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha
		1.278.000,00	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	1	1.932.831.184,00	Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktif dalam pengelolaan SD kelautan dan perikanan
Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	600	1.932.831.184,00	
Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1		
Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10		

		1.278.000,00	
Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan (Dokumen)	1	1.278.000,00	
		1.278.000,00	
Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	1	1.932.831.184,00	
Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	600	1.932.831.184,00	
Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1		
Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10		

3.25.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3.25.02.1.03.0002 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3.25.02.1.03.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			

Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	4		
Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	2		
Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	600	1.447.383.200,00	
		1.447.383.200,00	
Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1	10.000.000,00	
		10.000.000,00	

Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	4		
Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	2		
Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	600	1.447.383.200,00	
		1.447.383.200,00	
Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1	10.000.000,00	
		10.000.000,00	

Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
3.25.02.1.03.0005 - Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman				
Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman				
3.25.02.1.03.0006 - Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha				
Terlaksananya Fasilitas Akses Kemitraan Usaha				
3.25.02.1.03.0007 - Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman				
Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman				
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
Meningkatnya produksi perikanan tangkap				
3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				

Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10	52.580.000,00		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
			52.580.000,00	3.25.02.1.03.0005 - Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman
Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	2	214.480.400,00		Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman
			214.480.400,00	3.25.02.1.03.0006 - Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha
Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	4	4.700.000,00		Terlaksananya Fasilitas Akses Kemitraan Usaha
			4.700.000,00	3.25.02.1.03.0007 - Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman
Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	1	203.687.584,00		Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman
			203.687.584,00	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	532.015,20	37.548.972.400,00		Meningkatnya produksi perikanan tangkap
			37.548.972.400,00	3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10	52.580.000,00		
			52.580.000,00	
Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	2	214.480.400,00		
			214.480.400,00	
Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	4	4.700.000,00		
			4.700.000,00	
Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	1	203.687.584,00		
			203.687.584,00	
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	532.015,20	37.548.972.400,00		
			37.548.972.400,00	

Persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
3.25.03.1.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	14.817.384.600,00	Persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	0	14.817.384.600,00	
Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	66		
Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan (rekomendasi)	20		
Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	115		
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	226		
			3.25.03.1.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	1.000.000,00	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	14.817.384.600,00
Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	0	14.817.384.600,00
Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	66	
Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan (rekomendasi)	20	
Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	115	
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	226	
Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	1.000.000,00

3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			1.000.000,00	3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				
3.25.03.1.01.0004 - Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)			9.289.000.000,00	3.25.03.1.01.0004 - Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)
Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpon				
3.25.03.1.01.0005 - Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur			7.300.000,00	3.25.03.1.01.0005 - Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur				
3.25.03.1.01.0007 - Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur			0,00	3.25.03.1.01.0007 - Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur				
3.25.03.1.01.0010 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			66.710.000,00	3.25.03.1.01.0010 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	66		9.289.000.000,00	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan (rekomendasi)	20		7.300.000,00	Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpon	
Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	0		0,00	Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	
Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	115		66.710.000,00	Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	

					1.000.000,00
Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	66		9.289.000.000,00	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan (rekomendasi)	20		7.300.000,00	Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpon	
Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	0		0,00	Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	
Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	115		66.710.000,00	Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	

Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Persentase peningkatan produksi nelayan perairan darat yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
3.25.03.1.02.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat
3.25.03.1.02.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat

Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	226	5.453.374.600,00	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
		5.453.374.600,00	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	0	306.211.600,00	Persentase peningkatan produksi nelayan perairan darat yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Unit)	24	306.211.600,00	
			3.25.03.1.02.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	0	0,00	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat
		0,00	3.25.03.1.02.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Unit)	24	306.211.600,00	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat

Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	226	5.453.374.600,00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)
		5.453.374.600,00	
Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	0	306.211.600,00	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Unit)	24	306.211.600,00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Unit)
Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	0	0,00	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)
		0,00	
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Unit)	24	306.211.600,00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Unit)

3.25.03.1.03 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			306.211.600,00	3.25.03.1.03 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			306.211.600,00
Persentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 yang terbit izin usahanya		1	1.400.000,00	Persentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 yang terbit izin usahanya		1	1.400.000,00
Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)		0	1.400.000,00	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)		0	1.400.000,00
3.25.03.1.03.0004 - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				3.25.03.1.03.0004 - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			

			306.211.600,00	3.25.03.1.03 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			306.211.600,00
Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (Dokumen)		1	1.400.000,00	Persentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 yang terbit izin usahanya		1	1.400.000,00
Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)		0	1.400.000,00	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)		0	1.400.000,00
				3.25.03.1.03.0004 - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			

							306.211.600,00
Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (Dokumen)		1	1.400.000,00	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (Dokumen)		1	1.400.000,00
Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)		0	1.400.000,00	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)		0	1.400.000,00

Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
3.25.03.1.03.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
3.25.03.1.05 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	0	0,00	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
		0,00	3.25.03.1.03.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (Dokumen)	1	1.400.000,00	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
		1.400.000,00	3.25.03.1.05 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	0	0,00
		0,00
Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (Dokumen)	1	1.400.000,00
		1.400.000,00

Persentase Tanda Daftar Kapal perikanan yang terbit berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
3.25.03.1.05.0003 - Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional
3.25.03.1.06.0001 - Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan (Dokumen)	1.729	1.100.000,00	Persentase Tanda Daftar Kapal perikanan yang terbit berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
		1.100.000,00	3.25.03.1.05.0003 - Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan (Dokumen)	1.729	1.100.000,00	Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
		1.100.000,00	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	2	22.421.816.200,00	Persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional
Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	7	22.421.816.200,00	
Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	19		
			3.25.03.1.06.0001 - Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan (Dokumen)	1.729	1.100.000,00
		1.100.000,00
Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan (Dokumen)	1.729	1.100.000,00
		1.100.000,00
Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	2	22.421.816.200,00
Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	7	22.421.816.200,00
Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	19	

Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
3.25.03.1.06.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
3.25.03.1.07 - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Persentase izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit
3.25.03.1.07.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)

Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	7	421.816.200,00	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
		421.816.200,00	3.25.03.1.06.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	2	21.893.405.000,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		21.893.405.000,00	3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	19	106.595.000,00	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
		106.595.000,00	3.25.03.1.07 - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0,00	Persentase izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit
		0,00	3.25.03.1.07.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)

Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	7	421.816.200,00
		421.816.200,00
Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	2	21.893.405.000,00
		21.893.405.000,00
Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	19	106.595.000,00
		106.595.000,00
Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0,00
		0,00

Persentase kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar
3.25.03.1.09.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
3.25.03.1.10 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Persentase kapal perikanan sampai 10 GT yang terdaftar
3.25.03.1.10.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	20	1.060.000,00	Persentase kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar
		1.060.000,00	3.25.03.1.09.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	20	1.060.000,00	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
		1.060.000,00	3.25.03.1.10 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0,00	Persentase kapal perikanan sampai 10 GT yang terdaftar
		0,00	3.25.03.1.10.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0,00	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
		0,00	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.177.477,80	5.031.469.216,00	Meningkatnya produksi perikanan budidaya
		5.031.469.216,00	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	20	1.060.000,00	Persentase kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar
		1.060.000,00	3.25.03.1.09.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	20	1.060.000,00	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
		1.060.000,00	3.25.03.1.10 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0,00	Persentase kapal perikanan sampai 10 GT yang terdaftar
		0,00	3.25.03.1.10.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0,00	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
		0,00	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.177.477,80	5.031.469.216,00	Meningkatnya produksi perikanan budidaya
		5.031.469.216,00	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan di laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
3.25.04.1.05.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	3	3.969.897.216,00	Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan di laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia (Unit)	1	3.969.897.216,00	
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	683		
Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	1		
Jumlah Pembudidaya (Orang)	40		
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		
Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		
			3.25.04.1.05.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0,00	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	3	3.969.897.216,00
Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia (Unit)	1	3.969.897.216,00
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	683	
Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	1	
Jumlah Pembudidaya (Orang)	40	
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	
Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0,00

3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			0,00	3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		683	2.547.413.216,00	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3.25.04.1.05.0004 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			2.547.413.216,00	3.25.04.1.05.0004 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		3	305.720.000,00	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3.25.04.1.05.0007 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			305.720.000,00	3.25.04.1.05.0007 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		40	12.000.000,00	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3.25.04.1.05.0010 - Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			12.000.000,00	3.25.04.1.05.0010 - Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

			0,00	3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	683		2.547.413.216,00	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
			2.547.413.216,00	3.25.04.1.05.0004 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	3		305.720.000,00	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
			305.720.000,00	3.25.04.1.05.0007 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah Pembudidaya (Orang)	40		12.000.000,00	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
			12.000.000,00	3.25.04.1.05.0010 - Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

			0,00	
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	683		2.547.413.216,00	
			2.547.413.216,00	
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	3		305.720.000,00	
			305.720.000,00	
Jumlah Pembudidaya (Orang)	40		12.000.000,00	
			12.000.000,00	

Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
3.25.04.1.05.0011 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan			999.892.000,00	
3.25.04.1.05.0013 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			999.892.000,00	
Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			4.872.000,00	
3.25.04.1.06 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			4.872.000,00	
Persentase pemanfaatan sarana pembudidaya ikan di perairan darat			1.061.572.000,00	

Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	1		100.000.000,00	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			100.000.000,00	3.25.04.1.05.0011 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia (Unit)	1		999.892.000,00	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan
			999.892.000,00	3.25.04.1.05.0013 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		4.872.000,00	Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			4.872.000,00	3.25.04.1.06 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2		1.061.572.000,00	Persentase pemanfaatan sarana pembudidaya ikan di perairan darat

Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	1		100.000.000,00	
			100.000.000,00	
Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia (Unit)	1		999.892.000,00	
			999.892.000,00	
Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		4.872.000,00	
			4.872.000,00	
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2		1.061.572.000,00	

3.25.04.1.06.0003 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.1.06.0004 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
3.25.05.1.01 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1.061.572.000,00	
			3.25.04.1.06.0003 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	811.572.000,00	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		811.572.000,00	3.25.04.1.06.0004 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	250.000.000,00	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		250.000.000,00	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	100	907.505.500,00	Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
		907.505.500,00	3.25.05.1.01 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1.061.572.000,00	
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	811.572.000,00	
		811.572.000,00	
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	250.000.000,00	
		250.000.000,00	
Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	100	907.505.500,00	
		907.505.500,00	

<p>Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</p>
--

Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	3	883.613.500,00	<p>Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</p>
Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan (Forum)	0	883.613.500,00	
Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (Hari Operasi)	63		
Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan (Unit)	0		
Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat (Unit)	5		
Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	20		
Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	14		

Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	3	883.613.500,00
Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan (Forum)	0	883.613.500,00
Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (Hari Operasi)	63	
Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan (Unit)	0	
Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat (Unit)	5	
Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	20	
Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	14	

	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	600			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	600		
	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani (Perkara)	1			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani (Perkara)	1		
	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun (Unit)	0			Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun (Unit)	0		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk (Orang)	0			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk (Orang)	0		
3.25.05.1.01.0007 - Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi					3.25.05.1.01.0007 - Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi			
Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani (Perkara)	1	1.940.000,00		Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	1	1.940.000,00	
3.25.05.1.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			1.940.000,00		3.25.05.1.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		1.940.000,00	

Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk
3.25.05.1.01.0010 - Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.0011 - Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat
3.25.05.1.01.0012 - Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan
3.25.05.1.01.0013 - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi

Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk (Orang)	0	0,00	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk
		0,00	3.25.05.1.01.0010 - Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (Hari Operasi)	63	372.445.000,00	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
		372.445.000,00	3.25.05.1.01.0011 - Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat (Unit)	5	82.474.900,00	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat
		82.474.900,00	3.25.05.1.01.0012 - Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan (Unit)	0	0,00	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan
		0,00	3.25.05.1.01.0013 - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	14	11.238.600,00	Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi

Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk (Orang)	0	0,00	
			0,00
Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (Hari Operasi)	63	372.445.000,00	
			372.445.000,00
Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat (Unit)	5	82.474.900,00	
			82.474.900,00
Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan (Unit)	0	0,00	
			0,00
Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	14	11.238.600,00	

3.25.05.1.01.0014 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi
3.25.05.1.01.0015 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun
3.25.05.1.01.0016 - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi

		11.238.600,00	3.25.05.1.01.0014 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	600	302.975.800,00	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi
		302.975.800,00	3.25.05.1.01.0015 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun (Unit)	0	0,00	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun
		0,00	3.25.05.1.01.0016 - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	20	17.515.000,00	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi

		11.238.600,00	
Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	600	302.975.800,00	
		302.975.800,00	
Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun (Unit)	0	0,00	
		0,00	
Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	20	17.515.000,00	

3.25.05.1.01.0017 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan
3.25.05.1.01.0018 - Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah
Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan
3.25.05.1.02 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

			17.515.000,00	3.25.05.1.01.0017 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	3		95.024.200,00	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan
			95.024.200,00	3.25.05.1.01.0018 - Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah
Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan (Forum)	0		0,00	Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan
			0,00	3.25.05.1.02 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

			17.515.000,00	
Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	3		95.024.200,00	
			95.024.200,00	
Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan (Forum)	0		0,00	
			0,00	

<p>Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>
<p>3.25.05.1.02.0004 - Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi</p>

<p>Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)</p>	12	23.892.000,00	<p>Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>
<p>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)</p>	8	23.892.000,00	
<p>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)</p>	12		
			<p>3.25.05.1.02.0004 - Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi</p>

<p>Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)</p>	12	23.892.000,00
<p>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)</p>	8	23.892.000,00
<p>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)</p>	12	

Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi
3.25.05.1.02.0005 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi
3.25.05.1.02.0006 - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	12	7.956.000,00	Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi
		7.956.000,00	3.25.05.1.02.0005 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	12	7.956.000,00	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi
		7.956.000,00	3.25.05.1.02.0006 - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	12	7.956.000,00
		7.956.000,00
Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	12	7.956.000,00
		7.956.000,00

Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan
3.25.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	8	7.980.000,00	Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi
		7.980.000,00	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan) Trilyun Rp (Rp)	33,2	562.558.700,00	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan (%)	85	562.558.700,00	
Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	7.676,9		
			3.25.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	8	7.980.000,00
		7.980.000,00
Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan) Trilyun Rp (Rp)	33,2	562.558.700,00
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan (%)	85	562.558.700,00
Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	7.676,9	

Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.25.06.1.01.0004 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko
3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	407.700,00	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		407.700,00	3.25.06.1.01.0004 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	407.700,00	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko
		407.700,00	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	407.700,00
		407.700,00
Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	407.700,00
		407.700,00

Persentase produksi UPI yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
3.25.06.1.02.0003 - Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)	5	502.997.000,00	Persentase produksi UPI yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (Kegiatan)	3	502.997.000,00	
3.25.06.1.02.0003 - Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			

Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)	5	502.997.000,00	Persentase produksi UPI yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (Kegiatan)	3	502.997.000,00	
3.25.06.1.02.0003 - Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			

<p>Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</p>
<p>3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</p>
<p>Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko</p>

<p>Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)</p>	5	362.079.000,00	<p>Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</p>
		362.079.000,00	<p>3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</p>
<p>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (Kegiatan)</p>	3	140.918.000,00	<p>Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko</p>

<p>Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)</p>	5	362.079.000,00	<p>Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</p>
		362.079.000,00	<p>3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</p>
<p>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (Kegiatan)</p>	3	140.918.000,00	<p>Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko</p>

3.25.06.1.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Persentase ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
3.25.06.1.03.0001 - Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

			140.918.000,00	3.25.06.1.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1		59.154.000,00	Persentase ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir (Sistem Informasi)	1		59.154.000,00	
Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (Ton)	0,54			
				3.25.06.1.03.0001 - Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

				140.918.000,00
Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1		59.154.000,00	Persentase ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir (Sistem Informasi)	1		59.154.000,00	
Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (Ton)	0,54			

Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	10.000.000,00	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	10.000.000,00
3.25.06.1.03.0004 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku			10.000.000,00	3.25.06.1.03.0004 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku			10.000.000,00
Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (Ton)	0,54	44.154.000,00	Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (Ton)	0,54	44.154.000,00
3.25.06.1.03.0005 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir			44.154.000,00	3.25.06.1.03.0005 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir			44.154.000,00
Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir (Sistem Informasi)	1	5.000.000,00	Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir (Sistem Informasi)	1	5.000.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan pemangku kepentingan telah disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang ada dan memenuhi beberapa indikator yang belum mencapai target. Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan. Berdasarkan Forum OPD terdapat beberapa usulan dari OPD Kabupaten/Kota sehingga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel .2.5.
(Tabel T-C.32 Sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Sulawesi Selatan

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK		Nilai Hilirisasi produksi garam	Rp.85.94 Milyar	
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	1038850.36 Ha	
		Jumlah produksi garam rakyat	99.965 ton	
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	23,91%	
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit)	21 Unit	
		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi (Ha)	55 Ha	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Maros, Takalar, Pangkep	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	64 Ha	Penanaman Mangrove Dilengkapi dengan Proposal Desa
Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Kabupaten Luwu, Wajo, Pangkajene Kepulauan, Maros dan Kota Makassar		0.12 Ha	Usulan Apartemen Ikan agar dilengkapi dengan proposal desa/proposal kelompok
	Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Takalar, Kepulauan Selayar, Maros		0.074 Ha	Usulan Transplantasi Karang /artificial Reef
	Kabupaten Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar		6 Unit	Usulan Pembangunan Tambatan Perahu agar dilengkapi proposal desa
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan (kelompok)		
		Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		
Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Jenpeonto	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	Usulan agar dilengkapi proposal kelompok
Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Takalar	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	Usulan sarana inovasi usaha garam , agar dilengkapi proposal kelompok
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Selayar	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	Usulan sarana inovasi usaha garam , agar dilengkapi proposal kelompok
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 9.210,12 Milyar	
		Jumlah produksi perikanan tangkap	413.030,8 Ton	

		Cakupan bina kelompok nelayan	30.25%	
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	27.17%	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	78,95 %	
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				
Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Maros, Luwu Timur, Bone, Sinjai, Jeneponto			
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Makassar, Palopo, Kabupaten Barru, Pangkep, Luwu, Maros, Luwu Utara, Takalar, Bone, Barru, Sinjai, Wajo,			
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi				
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Soppeng			
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (unit)		
		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		
Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PPI Macini Baji Kabupaten Pangkajene Kepulauan, PPI Cempae Kota Pare Pare	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	Usulan fasilitas fungsional Pelabuhan agar disesuaikan dengan dokumen perencanaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya	Rp. 15.958,39 Milyar	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.298.391,1 Ton	
		Persentase ketersediaan benur berkualitas	100%	
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar	150 Unit	
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Pare Kabupaten Maros, Takalar, Soppeng	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Takalar	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Unit	
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			133 Unit	
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kabupaten Pangkep, Bone, Jeneponto, Takalar, Luwu Utara, Wajo, Luwu, Palopo, Bantaeng, Maros	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	130 Unit	Sarana Budidaya Rumput Laut
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Kegiatan				

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil				
Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	Usulan berupa sarana pengawasan bagi POKMASWAS, agar dilengkapi dengan proposal kelompok
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
		Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan		
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi		
		Persentase pengujian mutu produk perikanan		
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing (unit usaha)		
		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (unit usaha)		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	Usulan agar dilengkapi proposal kelompok
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kabupaten Takalar, Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	5 Angkatan	Usulan Pertemuan Inovasi Produk Untuk UMKM, Pengadaan Bahan Kimia Pengujian UPT PBAPL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100 %	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	60%	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar, Kabupaten Barru	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Usulan E Proposal Kelautan dan Perikanan dan Penyediaan Benih UPT PBAPL
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bone, Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rehab Gedung Kantor CDK Bosowasi Rehab Kantor UPT PBAPL
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Usulan Roller Blind

Usulan yang telah disampaikan pada Forum OPD untuk kabupaten/kota sebanyak 56 usulan dan Pokok-Pokok Pikiran sebanyak 231 usulan. Usulan ini akan menjadi rancangan awal Rencana Kerja tahun 2025 namun usulan tersebut masih perlu dilengkapi data dukung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

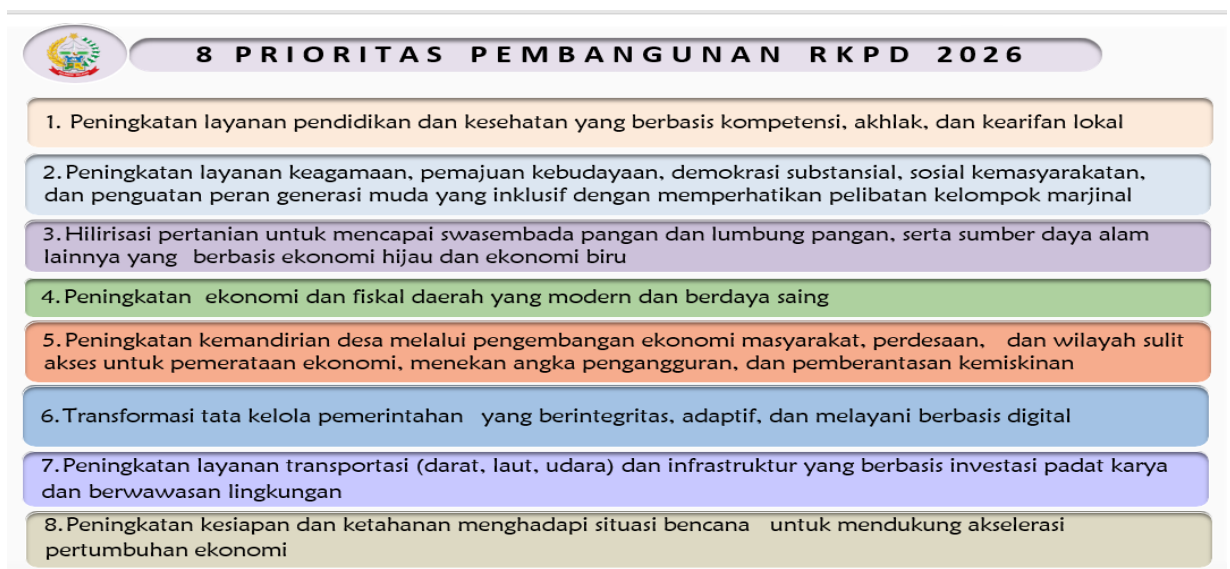
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Gambar 3.1
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Daerah



Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan Pembangunan daerah. Pada tahun 2026, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam delapan program prioritas Pembangunan daerah 2026, yang dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.

Gambar 3.2
8 Prioritas Pembangunan RKPD 2026



Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 dan mengacu pada prioritas nasional RKP Tahun 2025. Adapun tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Tema RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2025

TEMA RKPD TAHUN 2025

Kebijakan Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan Di Sulawesi Selatan Tahun 2025

01	Penangkapan Ikan Terukur		
02	Kawasan Konservasi dan Budidaya	04	Pengendalian sampah plastik
03	Penambahan luas kawasan konservasi	05	Penatakelolaan ruang laut

Gambar 3.1

Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2025



Sumber Bappenas 2024

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, dengan

prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA)
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTUKTUR)
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI)
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI)
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (LINGKUNGAN HIDUP)

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2025, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
5. Menurunkan kemiskinan;
6. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
8. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
11. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 3.4

Keterkaitan Renja dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 (RKPD 2024)

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Status Pembahasan Rakortek
Meningkatkan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	ruf/angka	16 (B)	31 (B)	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	2. Nilai SAKIP Provinsi	ruf/angka	08 (B)	52 (B)	
Meningkatkan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi		9	-6,9	-6,9
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Penghapusan Kemiskinan		3	-7,7	-7,7
Meningkatkan Pelestarian lingkungan hidup	Mempertahankan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	ton CO2 Eq	50.000	23.583	

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan Strategis Tahun 2024-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2025

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025	PELAKSANA KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi OPD	Huruf/Angka	62,27	
1.1	Sasaran : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Huruf/Angka	86–88 (A)	Kepala Dinas
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Huruf/Angka	99,55	Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Huruf/Angka	95	
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	100	
2	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	11,01	
2.1	Sasaran : Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	10,5	Kepala Dinas
		Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel	%	22,6	
		Produksi Perikanan	ton	4.779.259,3	
		Konsumsi Ikan	kg/Kap/Th	72,48	
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rupiah	11933561187.2	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	442.959.6	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	29	Kepala Bidang Perikanan Tangkap , Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	30.62	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025	PELAKSANA KINERJA
-1	-2	-3	-4	-4	-5
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	73,68	Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
		Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.M)	Rp.M	21,819,765,780.70	Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III)
		Jumlah Produksi perikanan budidaya (Rp.M)	Ton	4,246,372.30	
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	%	80	Kepala UPT BPAPL (Eselon III)
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Produksi garam rakyat	Ton	48,450	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K (eselon III)
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	%	18	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K dan Kepala CDK (eselon III)
d.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp.M)	Rp.M	373.28	Kepala Bidang Perikanan Budidaya,
		Produksi olahan ikan (ton)	Ton	6,029.83	sda
		Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)	%	100	Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
2.2	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	NTUP	Indeks	109,33	Kepala Dinas
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	NTN	Indeks	110,46	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	NTPi	Indeks	111,07	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing
3	Tujuan : Meningkatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan	Potensi penurunan emisi GRK dari sektor perikanan	juta ton CO2	7.351,3	

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025	PELAKSANA KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
3.1	Sasaran: Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	95,89	Kepala Dinas
		Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	%	96,08	
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	47,56	
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	861,931.17	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut Pesisir dan P3K dan Kepala CDK (Eselon III)
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Unit usaha	89,85	Kepala Bidang Pengawasan SDKP dan Kepala CDK (Eselon III)

Agar arah pembangunan terintegrasi dengan **Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan** maka sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 hubungan tujuan dan sasaran saling mendukung dan terkait satu sama lain yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel . 3.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RENJA Dinas Tahun 2025

No	RKPD		Renja	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1.Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2	Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	2.1.Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	2.Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	2.1.Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah factor produksi dan produktivitas produksi 2.3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana	3.1.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.Meningkatkan kelestariandan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	2.1 Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan

Berdasarkan penelaahan permasalahan pada Bab II dilakukan penyesuaian dengan tujuan dan sasaran berdasarkan pemetaan program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Perumusan Program

Tujuan	Sasaran	Langkah Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan dan didukung oleh inovasi teknologi dan informasi serta Pembinaan yang Inklusif bagi pelaku usaha untuk mendorong produktivitas serta Revitalisasi Wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis kawasan serta pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global • Pengembangan pola kemitraan usaha untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah produk • Perbaikan sarana dan prasarana produksi perikanan baik pada faktor produksi maupun metode kerja serta Perbaikan standarisasi kualitas produk dari hulu ke hilir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangka 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha pengolahan Perikanan dan diversifikasi produk dengan inovasi teknologi olahan yang bermutu dan berdayasaing • Fasilitasi dalam pengembangan jejaring dan akses keuangan serta permodalan dalam rangka perluasan usaha dan penguatan pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Hilirisasi Perikanan 2. Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk dalam rangka peningkatan imun dan penurunan stunting 3. Peningkatan volume dan nilai produksi hilirisasi perikanan 	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha	Penguatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

	kelautan dan perikanan			
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Pengawasan wilayah t, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya autan serta Koordinasi dan jasa, pengelolaan ta pengamanan wilayah t dari pemanfaatan mberdaya kelautan dan Perikanan	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut, pengendalian dan konservasi kawasan pesisir dan laut serta Penataan dan pengelolaan ruang laut	Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
		Peningkatan Pengawasan kolaborasi Multipihak dan penerapan inovasi teknologi informasi pada sektor kelautan dalam menjaga dan mengawasi perairan laut dalam rangka pengendalian dan pengurangan IUU Fishing	Menjaga Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaatannya SDI yang lestari dan keberlanjutan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta kelestarian lingkungan pesisir dan laut	Pengembangan inovasi teknologi, edu wisata dan eko wisata untuk pengelolaan kawasan konservasi dan daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan serta penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam memelihara Lingkungan pesisir dan Laut	Penataan dan pengelolaan sector kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau kecil	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sedangkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaras dengan sasaran pembangunan jangka pendek tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	Target Capaian Tahun 2024	Formulasi	Pengukuran Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS1.1 Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86–88 (A)	Lembar Hasil Evaluasi	Permenpan
SS2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan				
1	Produksi Perikanan (ton)	4,903,694.4	Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya)	BPS
2	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulsel (%)	10,5	(PDRB perikanan /PDRB Daerah)x100%	BPS
3	Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor Sulsel (%)	22,6	(Jumlah ekspor hasil perikanan (ton)/Jumlah Ekspor Daerah (ton)) x 100%	BPS
4	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	72,48	AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	BPS
SS2.2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan				
1	Nilai Tukar Usaha Perikanan	109.33	(Indeks yang diterima usaha perikanan / Indeks yang dibayar usaha perikanan) x 100%	BPS
SS3.1 Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan				
1	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	95,89	Jumlah total pelaku Usaha yang diperiksa/jumlah pelau Usaha yang patuh)/jenis usaha)x100%	DKP (data olahan)
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	47,56	(Jumlah Tangkapan Ikan 80% dari tangkapan maksimum Lestari) x100	DKP(data olahan)
3	Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	96.08	(Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan / Total luas Kawasan perairan konservasi) x 100%	DKP(data olahan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2026 telah sesuai dengan RPJMD/RPD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan hal sebagai berikut

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam mendukung :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi,
- Penurunan Stunting,
- Pencapaian Pelayanan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam rangka implementasi Ekonomi Biru di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2026, antara lain meliputi :

- Jumlah program sebanyak 6 Program dan jumlah kegiatan sebanyak 25 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 101 sub kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebar pada program prioritas Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kemudian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya kemudian dalam rangka mendukung Hilirisasi didukung oleh Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. dan untuk mendukung Operasional kegiatan didukung oleh Program Penunjang Administrasi. dengan uraian sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,**

Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah

12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 3) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap,

Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, 4) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, 5) Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya,

Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Diarahkan pada : 1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, 2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

5. Program Pengolahan dan Pemasaran produk perikanan,

Diarahkan pada 1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

6. Program Penunjang Adminsitasi

Diarahkan dna Fokus pada Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Total kebutuhan dana/pagu (tentative) yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah **Rp. 95.783.454.312,103 sesuai RKPD Tahun 2026** sedangkan usulan Pagu dengan rincian anggaran per program .yaitu :

No	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	FOKUS
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 5.651.892.184	Pengembangan Usaha Sentra Ekonomi Garam Rakyat Pendukung Produksi, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengelola Ekosistem Blue Carbon serta Rehabilitasi Kawasan Konseravasi di wilayah pesisir dan pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan pulau-Pulau Kecil
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 52.548.972.400	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Penyediaan sarana pendukung Penangkapan Ikan Terukur, serta pengembangan Pelabuhan perikanan
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 5.031.469.216,41	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut, Penyediaan sarana Pembudidayaan ikan di laut dan air tawar,
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 562.558.700	Pembinaan Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan

			Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing, Penerapan Persyaratan Atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 907.505.500	Pengendalian, Pengawasan Usaha Penangkapan dan Budidaya serta Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lainnya untuk Menjaga kelestariannya
6	Program Penunjang Adminsitasi	Rp. 31.081.056.311,69	Gaji dan Tunjangan, Dukungan Manajemen Operasional Program Kegiatan Teknis dan Rutin
	JUMLAH	Rp. 95.783.454.312,10	

- c. Pada Rumusan Program Kegiatan terdapat ketidaksesuaian dengan rancangan awal karena terdapat beberapa penyesuaian berdasarkan Kepmendagri No.Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dilakukan pemetaan numenklatur program dan kegiatan berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja Tahun 2024 terhadap kesesuaian dengan RKPD oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					95.783.454.312,10				135.080.258.429,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				95.783.454.312,10				135.080.258.429,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				95.783.454.312,10				135.080.258.429,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				31.081.056.311,69		-		32.074.449.329,00
	[Terpenuhiya Layanan penunjang perangkat daerah yang mendukung tugas dan fungsi]	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi		100	31.081.056.311,69	-	-	-	32.074.449.329,00
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	294.545.200,00		-		332.160.000,00
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	9.575.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.000.000,00
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.955.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.860.000,00
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.600.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.070.000,00

3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.233.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.330.000,00	
3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.233.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.650.000,00	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	185.909.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	28.971.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34.250.000,00	
3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
		<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Data	34.665.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51.000.000,00	
3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	8.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	

3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan</i>		100 %	27.435.012.586,00		-		28.521.018.467,00
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315 Orang/ Bulan	27.414.387.936,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			28.490.108.467,00
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	763.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000,00
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	540.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000,00
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	828.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.280.000,00
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	676.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.130.000,00

3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								25.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	17.336.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								500.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	478.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik</i>		100 %	9.269.000,00		-	11.930.000,00	
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								680.000,00
		<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	228.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								5.200.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.782.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3.25.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								3.450.000,00
		<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.141.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								2.600.000,00
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2.117.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

3.25.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian target pendapatan perangkat daerah</i>		100 %	8.273.200,00		-		12.750.000,00
3.25.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.265.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
3.25.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.008.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.750.000,00
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah</i>		100 %	80.933.400,00		-		88.351.720,00
3.25.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.849.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.724.000,00
3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	14.857.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.830.000,00
3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			659.000,00
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								

		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	49.026.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.220.000,00
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.459.360,00
3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.459.360,00
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan layanan umum kantor</i>		100 %	160.531.000,00		-		153.922.000,00
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	6.269.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.000.000,00
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Paket	40.252.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.568.000,00
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.956.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.416.000,00
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang</i>	Semua Kota/Kab, Semua	2 Paket	23.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.789.000,00

		<i>Disediakan</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3.25.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.047.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.507.000,00
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	78.040.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96.809.000,00
3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	374.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			833.000,00
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	47.000.000,00	-			70.000.000,00
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	32.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00

3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah		100 %	2.778.964.925,69		-		2.730.187.142,00
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	826.835.925,69	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			821.744.950,00
3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	7.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.560.000,00
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.945.029.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.900.882.192,00
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD		100 %	266.527.000,00		-		154.130.000,00
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	66.527.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28.000.000,00
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.130.000,00
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00
3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								

		<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
3.25.02	PROGRAM				5.651.892.184,00	-			51.866.440.000,00
	PENGELOLAAN								
	KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
	[Meningkatkan	Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan	-	66.93	5.651.892.184,00	-	-		51.866.440.000,00
	perlindungan laut dan sumberdayanya melalui pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil]								
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	<i>Persentase kawasan konservasi yang dikelola</i>		68,05 %	3.719.783.000,00		-		47.293.440.000,00
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat								
		<i>Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63447.23 Ha	338.272.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000.000,00
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
		<i>Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43,60 Ha	2.706.136.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46.111.940.000,00
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
		<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-</i>	Semua Kota/Kab,	100 Orang	10.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH			120.000.000,00

		<i>Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)		
3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/							
		<i>Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	320.245.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir							
		<i>Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru							
		<i>Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Pelaku Usaha	8.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00
3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan							
		<i>Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	22.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
3.25.02.1.01.0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon							
		<i>Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kelompok Masyarakat	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140.000.000,00
3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam							
		<i>Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan</i>	Semua Kota/Kab, Semua	3 Kelompok	8.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31.500.000,00

		<i>pemeliharaan prasarana tambak garam</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3.25.02.1.01.0012	Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat								
		<i>Volume produksi garam lokal pada SEGAR</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49921.8 Ton	203.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman								
		<i>Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	<i>Persentase peningkatan ijin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 Mil di luar minyak dan gas bumi</i>		20 %	1.278.000,00		-		27.000.000,00
3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha								
		<i>Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.278.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27.000.000,00
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktif dalam pengelolaan SD kelautan dan perikanan</i>		20 Kelompok	1.930.831.184,00		-		4.546.000.000,00
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
		<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Orang	1.457.383.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.750.000.000,00
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
		<i>Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80.000.000,00

		<i>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>							
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
		<i>Jumlah kelompok</i>	Semua	10 Kelompok	52.580.000,00	PENDAPATAN			10.000.000,00
		<i>Masyarakat yang memperoleh Pendampingan,</i>	Kota/Kab, Semua			ASLI DAERAH (PAD)			
		<i>Kemudahan Akses Ilmu</i>	Kecamatan,						
		<i>Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta</i>	Semua Kel/Desa						
		<i>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>							
3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman								
		<i>Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia</i>	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	214.480.400,00	PENDAPATAN			920.000.000,00
			Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			ASLI DAERAH (PAD)			
			Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
			Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3.25.02.1.03.0006	Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha								
		<i>Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit Usaha	4.700.084,00	PENDAPATAN			36.000.000,00
						ASLI DAERAH (PAD)			
3.25.02.1.03.0007	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman								
		<i>Jumlah Prasarana Usaha</i>	Semua Kota/Kab,	1 Unit	191.687.500,00	PENDAPATAN			1.750.000.000,00
						ASLI DAERAH			

		<i>Pergaraman yang tersedia</i>	Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03	PROGRAM				52.548.972.400,00		-		25.956.742.900,00
	PENGELOLAAN								
	PERIKANAN TANGKAP								
	[Meningkatkan produksi perikanan tangkap]	Produksi Perikanan Tangkap	-	532015.2	52.548.972.400,00	-	-		25.956.742.900,00
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	<i>Persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan</i>		5,78 %	30.217.384.600,00		-		5.586.742.900,00
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	<i>Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230 Unit	24.689.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000.000,00
3.25.03.1.01.0004	Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	<i>Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 rekomendasi	7.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.700.000,00
3.25.03.1.01.0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	<i>Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115 Unit	66.710.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			520.000.000,00
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226 Unit	5.453.374.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.038.042.900,00

3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan	<i>Persentase peningkatan</i>		undefined	306.211.600,00		-		325.000.000,00
	Ikan di Wilayah Sungai,	<i>produksi nelayan perairan</i>		undefined					
	Danau, Waduk, Rawa, dan	<i>darat yang mendapatkan</i>							
	Genangan Air Lainnya yang	<i>fasilitasi dan pembinaan</i>							
	dapat Diusahakan Lintas								
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan								
		<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat</i>	Semua	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN			25.000.000,00
			Kota/Kab,						
			Semua						
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap								
		<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat</i>	Semua	24 Unit	306.211.600,00	PENDAPATAN			300.000.000,00
			Kota/Kab,						
			Semua						
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Persentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 yang terbit izin usahanya</i>		undefined %	1.400.000,00		-		40.000.000,00
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil								
		<i>Tingkat Penyelesaian</i>	Semua	0 Persentase	0,00	PENDAPATAN			30.000.000,00
		<i>Rekomendasi Perizinan</i>	Kota/Kab,						
		<i>Berusaha Subsektor</i>	Semua						
		<i>Penangkapan dan</i>	Kecamatan,						
		<i>Pengangkutan Ikan untuk</i>	Semua Kel/Desa						
		<i>kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>							
3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil								
		<i>Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi</i>	Semua	1 Dokumen	1.400.000,00	PENDAPATAN			10.000.000,00
			Kota/Kab,						
			Semua						
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						

		sampai dengan 12 mil yang tersedia							
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Tanda Daftar Kapal perikanan yang terbit berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		undefined %	1.100.000,00		-		25.000.000,00
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT								
		Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Semua	1729	1.100.000,00	PENDAPATAN			25.000.000,00
			Kota/Kab,	Dokumen		ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi	Persentase pelabuhan		36,84 %	22.021.816.200,00		-		19.920.000.000,00
	Pembangunan serta	perikanan yang memenuhi							
	Pengelolaan Pelabuhan	standar operasional							
	Perikanan Provinsi								
3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan								
		Jumlah Lokasi	Semua	7 Pelabuhan	21.816.200,00	PENDAPATAN			50.000.000,00
		Pembangunan Pelabuhan	Kota/Kab,	Perikanan		ASLI DAERAH			
		Perikanan	Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Semua	2 Unit	21.893.405.000,00	PENDAPATAN			19.750.000.000,00
			Kota/Kab,			ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan								
		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Semua	19 Layanan	106.595.000,00	PENDAPATAN			120.000.000,00
			Kota/Kab,			ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai	-		-	0,00		-		10.000.000,00

	dengan 30 GT								
3.25.03.1.07.0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)								
		<i>Jumlah Rekomendasi</i>	Semua	0 Rekomend	0,00	PENDAPATAN			10.000.000,00
		<i>Persetujuan Pengadaan</i>	Kota/Kab,	asi		ASLI DAERAH			
		<i>Kapal Perikanan (PPKP)</i>	Semua			(PAD)			
		<i>yang Diterbitkan</i>	Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	0,00		-		0,00
3.25.03.1.08.0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)								
		<i>Jumlah Rekomendasi</i>	Semua	0 Rekomend	0,00	PENDAPATAN			0,00
		<i>Persetujuan Pengadaan</i>	Kota/Kab,	asi		ASLI DAERAH			
		<i>Kapal Perikanan (PPKP)</i>	Semua			(PAD)			
		<i>yang Diterbitkan yang</i>	Kecamatan,						
		<i>Menjadi Kewenangan Provinsi</i>	Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Persentase Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar dan memiliki ijin usaha</i>		undefined %	1.060.000,00		-		30.000.000,00
3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)								
		<i>Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan</i>	Semua	1260 Rekom	1.060.000,00	PENDAPATAN			30.000.000,00
			Kota/Kab,	endasi		ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di PUD yang memiliki ijin</i>		undefined %	0,00		-		20.000.000,00
3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)								

		<i>Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan</i>	Semua	0 Rekomendasi	0,00	PENDAPATAN			20.000.000,00
			Kota/Kab,	asi		ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.04	PROGRAM				5.031.469.216,41		-		19.960.500.000,00
	PENGLOLAAN								
	PERIKANAN BUDIDAYA								
	[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Produksi Perikanan Budidaya	-	5177477.8	5.031.469.216,41	-	-		19.960.500.000,00
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan	<i>Persentase peningkatan</i>		undefined %	3.969.896.316,41		-		16.805.885.400,00
	Ikan di Laut	<i>produksi pembudidayaan ikan</i>							
		<i>di laut yang mendapatkan</i>							
		<i>fasilitasi dan pembinaan</i>							
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Semua	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN			20.000.000,00
			Kota/Kab,			ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut								
		<i>Jumlah Prasarana</i>	Semua	554 Unit	2.547.422.316,41	PENDAPATAN			14.218.854.000,00
		<i>Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Kota/Kab,			ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut								
		<i>Jumlah Sarana</i>	Semua	3 Unit	305.720.000,00	PENDAPATAN			1.442.031.400,00
		<i>Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Kota/Kab,			ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi								
		<i>Jumlah Pembudidaya</i>	Semua	40 Orang	12.000.000,00	PENDAPATAN			60.000.000,00
			Kota/Kab,			ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.04.1.05.0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
		<i>Jumlah Pembudidaya</i>	Kab. Barru,	1 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN			400.000.000,00

		<i>Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan</i>	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			ASLI DAERAH (PAD)			
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	999.882.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600.000.000,00
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.872.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65.000.000,00
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	<i>Persentase penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan di perairan darat yang dikelola lintas daerah Kabupaten/Kota</i>		undefined %	1.061.572.900,00		-		3.154.614.600,00
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	811.572.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.754.614.600,00
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000.000,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				907.505.500,00		-		1.298.126.200,00
	Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan]	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	100	907.505.500,00	-	-		1.298.126.200,00

3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan		undefined %	883.589.500,00		-		1.274.126.200,00
		Sumber Daya Kelautan dan							
		Perikanan sampai dengan 12							
		Mil							
3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi								
		Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Semua	1 Perkara	1.940.000,00	PENDAPATAN			2.000.000,00
			Kota/Kab,			ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan								
		Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Semua	63 Hari	372.445.000,00	PENDAPATAN			400.000.000,00
			Kota/Kab,	Operasi		ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan								
		Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Semua	5 Unit	82.474.900,00	PENDAPATAN			250.000.000,00
			Kota/Kab,			ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi								
		Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua	14 Pelaku	11.238.800,00	PENDAPATAN			14.000.000,00
			Kota/Kab,	Usaha		ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi								
		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua	600 Pelaku	302.975.800,00	PENDAPATAN			348.126.200,00
			Kota/Kab,	Usaha		ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi								
		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua	114 Pelaku	17.515.000,00	PENDAPATAN			5.000.000,00
			Kota/Kab,	Usaha		ASLI DAERAH			
			Semua			(PAD)			
			Kecamatan,						
			Semua Kel/Desa						
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)								

		<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kelompok Masyarakat	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00	
3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah									
		<i>Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Forum	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>		undefined %	23.916.000,00		-		24.000.000,00	
3.25.05.1.02.0004		Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi								
			<i>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Pelaku Usaha	7.956.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.000.000,00
3.25.05.1.02.0005		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi								
			<i>Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Pelaku Usaha	7.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.000.000,00
3.25.05.1.02.0006		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi								
			<i>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau,</i>	Semua Kota/Kab, Semua	6 Pelaku Usaha	7.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.000.000,00

		waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				562.558.700,00		-		3.924.000.000,00
	[Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan]	Nilai Ekonomi Hasil Tangkap, Perikanan	-	33.2	562.558.700,00	-	-		3.924.000.000,00
		Trilyun Rp		6771.5					
		Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan			85				
		Produksi Olahan Hasil Perikanan							
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	undefined		undefined	407.700,00		-		26.000.000,00
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	407.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26.000.000,00
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-		-	502.997.000,00		-		3.678.000.000,00
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing								
		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	362.079.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.680.000.000,00

		<i>yang Aman dan Bermutu</i>							
		<i>untuk dikonsumsi atau</i>							
		<i>digunakan, dan Berdaya</i>							
		<i>Saing</i>							
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								
		<i>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan	140.918.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.998.000.000,00
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>undefined</i>		undefined undefined	59.154.000,00	-			220.000.000,00
3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
3.25.06.1.03.0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku								
		<i>Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.54 Ton	44.154.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00
3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir								
		<i>Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sistem Informasi	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
J U M L A H					95.783.454.312,10				135.080.258.429,00

Berdasarkan tabel diatas maka diuraikan sasaran strategis tahun 2026 yang akan didukung yaitu:

Sasaran :

1. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Meningkatkan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Didukung oleh program :

Program Prioritas :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator Program :

- a. Persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan sebesar 5,78 %
- b. Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil sebesar 230 unit
- c. Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan sebesar 20 rekomendasi
- d. Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur sebesar 115 unit
- e. Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil sebesar 226 unit
- f. Persentase peningkatan produksi nelayan perairan darat yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan sebesar
- g. Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat sebesar 24 unit
- h. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2025 sebesar Rp. 9.210,12 M
- i. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2025 sebesar 413.030,8 ton
- j. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional tahun 2025 sebesar 78,95 %
- k. Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2025 sebesar 30.25 %
- l. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayanpada tahun 2025 sebesar 27.17 %

Program ini meliputi kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan aspek kajian pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil berbasis Teknologi penangkapan ikan (fishing technology) yang diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti, penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara

- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.
- d) Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Ikan
- e) Pelayanan rekomendasi usaha Perikanan tangkap dalam rangka perijinan dan kemudahan akses nelayan dalam melakukan usaha Perikanan tangkap di luar wilayah penangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan.
- f) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama yang berbasis antar pemerintah, institusi, lembaga dan swasta dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- g) Revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih modern untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap dan mendukung *Marine Culture*.

Kajian ikan target tangkapan (fish target) dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik

yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai. Selain itu memberdayakan armada plasma yang merupakan kapal/perahu nelayan skala kecil untuk mendukung *marine culture*.

Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

2. Program Perikanan Budidaya :

Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya tahun 2025 Rp. Rp. 15.958,39 M**
- b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2025 sebesar 4.298.391,1 ton**
- c. Persentase ketersediaan benur berkualitas 100% per tahun**

Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan komoditas unggulan yaitu udang windu dan rumput laut serta komoditas ikan lainnya dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi. Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut**
- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut**
- c. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- d. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi**

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan ini adalah kelompok prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2025 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan yaitu **udang windu** dan **rumput laut** dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi berbasis kawasan dan berkelanjutan sampai tahun 2025. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya, 3) Pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global. Adapun produksi komoditas unggulan perikanan budidaya pada tahun awal kondisi tahun 2018 dan 2020 dan rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Selain itu Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar didaerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Selain itu dilakukan pengembangan kampung pembudidaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, kampung ini diharapkan dapat memulihkan Ekonomi masyarakat dengan Corporate Farming dengan membangun Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau Dan Laut seperti *Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, Kerapu, Rumput Laut, dll.*

Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng dan komoditas ikan lainnya. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka implementasi program, kegiatan dan

subkegiatan lebih diarahkan pada:

- a. Pengembangan budidaya rumput laut dengan melakukan pengembangan dari hulu yaitu pengembangan bibit hasil kultur jaringan dan hilir yaitu penanganan pasca panen di 19 kabupaten/kota serta percontohan budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan di kabupaten/kota yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan untuk produksi benur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan benur pada program prioritas dan permintaan masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya payau.
- c. Pengembangan budidaya air tawar sesuai kewenangan provinsi dan pemeliharaan sarpras instalasi Balai Benih Ikan Provinsi dalam rangka peningkatan produksi benih komoditas ikan air tawar dan memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pemulihan ekonomi.
- d. Revitalisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya payau dan air tawar dalam rangka peningkatan produksi, pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan pandemik global dan ketersediaan pangan ikan dari perikanan budidaya untuk penanganan stunting.
- e. Pengendalian dan pengelolaan Kesehatan lingkungan budidaya payau, tawar dan laut.
- f. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.
- g. Penyediaan prasarana produksi budidaya air tawar dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan, perluasan jejaring, kerjasama antar pemerintah, institusi, lembaga, swasta dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah.

3. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program

- a. **Produksi garam rakyat tahun 2025 sebesar 48.450 ton**
- b. **Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan tahun 2025 sebesar 100%**

Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya **pesisir dan pulau-**

pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut.

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini diarahkan pada pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep , Kabupaten Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam mini, penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk yang lebih berdaya saing.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2025 sebesar Rp. 317.28 Milyar**
- b. Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2025 sebesar 5.544,1 ton**
- c. Persentase pembinaan mutu produk perikanan tahun 2025 sebesar 100%**

Tahun 2025 akan dilakukan upaya untuk mendukung hilirisasi produk perikanan dan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat dan menghasilkan produk yang berdaya saing untuk menghadapi masa pandemik dan menumbuhkan kembali usaha unit pengolah yang tahun 2020 mengalami masa sulit dalam berusaha akibat pandemik global maka optimalisasi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan, pembinaan dan revitalisasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran dalam mendukung bahan baku industri serta melakukan inovasi olahan produk perikanan. Adapun dukungan kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
- 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran diarahkan pada program hilirisasi perikanan dengan melakukan inovasi produk pengolahan agar produk perikanan memiliki nilai tambah produk sehingga memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu program ini mendukung pencapaian indikator SDGs untuk penurunan stunting dan pemulihan ekonomi. Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

Sasaran : Meningkatkan kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program :

- a. **Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2025 sebesar 67,31%**
- b. **Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2025 sebesar 100 %**

Program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta mendukung penurunan/emisi karbon.

Pada program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 2. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
 - b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun upaya yang dilakukan pada sub kegiatan adalah

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan inovasi pemanfaatan dan pengelolaan.
- e. Penyusunan kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang
- f. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan
- g. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses
- h. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- i. Pengembangan Wisata Bahari dan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dengan integrasi pengembangan lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.

- j. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi dan melakukan pembinaan kelompok.

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Program :

Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tahun 2025 sebesar 89,85%

Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- c. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya

- b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
- c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Patroli dalam rangka pengawasan baik di laut, perairan umum dan darat serta koordinasi dan pengawasan terpadu bersama aparat terkait dalam rangka melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dan penanganan kasus.
2. Kerjasama antar pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi lain dalam rangka pengawasan wilayah laut dan perairan umum.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
4. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
5. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan yang dilaksanakan dengan melibatkan kaum muda yang berada di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
6. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan disetiap daerah dan melakukan pembinaan
7. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
8. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program :

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik
- c. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP

Pada program ini akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. *Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatan :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- d. Pengolahan Data Retribusi Daerah
- e. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- f. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h. Pemindehan Tugas ASN
- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

7. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Adapun sub kegiatannya :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Aset Tak Berwujud

8. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

